

PEREMPUAN NU DAN PILKADA
(Studi Terhadap Polarisasi Dukungan Politik Muslimat dan Fatayat NU
Terhadap Pasangan Indah Putri Indriani-Thahar Rum Di Pilkada Serentak
Tahun 2015)



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ilmu
Politik Jurusan Ilmu Politik Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh :

AHMAD AUFA ZAINAL

NIM. 30600114004

FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ahmad Aufa Zainal**

NIM : 30600114004

Tempat/Tgl. Lahir : Masamba, 02 Januari 1996

Jurusan : Ilmu Politik

Fakultas : Ushuluddin, Filsafat dan Politik

Alamat : Jl. Maros Raya Blok B No. 74 A Perumnas Sudiang,
Makassar

Judul Skripsi : **Perempuan NU dan Pilkada (Studi Terhadap Polarisasi Dukungan Politik Muslimat dan Fatayat NU Terhadap Pasangan Indah Putri Indriani-Thahar Rum Di Pilkada Serentak Tahun 2015)**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Juni 2018

Yang menyatakan,

Ahmad Aufa Zainal
NIM. 30600114004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul PEREMPUAN NU DAN PILKADA (Studi Terhadap Polarisasi Dukungan Politik Muslimat dan Fatayat NU Terhadap Pasangan Indah Putri Indriani-Thahar Rum Di Pilkada Serentak Tahun 2015), yang disusun oleh AHMAD AUFA ZAINAL, Nim: 30600114004, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang telah diselenggarakan pada tanggal 06 Juni 2018, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik, (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 28 Juni 2018

DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Dr. Tasmin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	:	Syahrir Karim, M.Si, Ph.D	(.....)
Munaqisy I	:	Dr. Anggriani Alamsyah, M.Si	(.....)
Munaqisy II	:	Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si	(.....)
Pembimbing I	:	Nur Aliyah Zainal, S.IP, MA	(.....)
Pembimbing II	:	Febrianto Syam, S.IP, M.IP	(.....)

Diketahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar



H. Muh. Natir, MA

19590704 1969031 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang paling mulia diucapkan selain puji dan syukur kehadiran Allah Swt karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya yang senantiasa diberikan pada diri penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perempuan NU dan Pilkada (Studi Terhadap Polarisasi Dukungan Politik Muslimat dan Fatayat NU Terhadap Pasangan Indah Putri Indriani-Thahar Rum Di Pilkada Serentak Tahun 2015)”**

Mari pula kita senantiasa berhalawat serta salam kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Saw sebagai seorang pioner dalam mendobrak dekadensi moral dipermukaan bumi ini, kepada keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya.

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalam penelitian ini, mendasar pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Bapak Syahrir Karim, M.Si, Ph. D selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Politik.
4. Ibu Nur Aliyah Zainal, S.IP, M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak pengetahuan dan kontribusi ilmu pengetahuan terkait judul yang diangkat penulis dan Bapak Febrianto Syam, S.IP, M.IP selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuannya terkait judul yang diangkat penulis.
5. Ibu Dr. Anggriani Alamsyah, M.Si selaku penguji I yang memberikan kritikan dan masukan kepada penulis dan Ibu Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si selaku penguji II yang turut memberikan kritikan, masukan dan saran kepada penulis sehingga dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan penelitian penulis.
6. Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan dan staf pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian studi penulis.
7. Kedua orang tua penulis yang tercinta yakni Atta Drs. Zainal Abidin dan Ibu Dra. Rahayu D, M.Pd.I yang tiada pernah putus do'a demi kesuksesan belajar penulis, tiada pernah putus untuk memberikan seluruh cinta serta kasih sayangnya, dan juga yang telah memberikan dukungan lahir batin kepada penulis dalam proses studi selama ini.
8. Saudara-saudari kandung penulis yakni Muhyiddin Zainal dan Nur Intan Zahra yang tersayang dan selalu memberikan motivasi serta semangat serta selalu memberikan dukungan disetiap langkah penulis dalam menempuh studi.
9. Teman-teman angkatan 2014 tanpa terkecuali khususnya kelas IPO 1-2 Angkatan 2014: Ilyas, Fauzia, Fajri, Mita, Iwa, Saeful, Syafaat, Syahrul, Agil, Abdillah, Hamzah, Iis, Chairil, Erna, Fitria, Hidayah, Idham, Isna, Lia, Saiful, Siddiq, Uel, Yunita, Yusuf, Ratna, Yuyun dan Reski yang telah memberikan banyak semangat dan motivasi kepada penulis. Tak lupa pula ucapan kepada

Filda Aprilia, SH yang memberikan semangat tiada henti kepada penulis, para senior di jurusan ilmu politik, teman-teman KKN Angkatan 57 Kelurahan Bonto Lebang penulis banyak ucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan arti kebersamaan dan membantu penulis selama perkuliahan atau di luar dari perkuliahan sampai sekarang ini, yang senang tiasa memberikan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap kiranya tugas akhir ini dapat berguna bagi seluruh pembaca pada umumnya dan penulis pribadi khususnya.

Makassar, 28 Juni 2018
Penulis,

Ahmad Aufa Zainal
NIM. 30600114004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	13
BAB II LANDASAN TEORITIK	19
A. Kerangka Teori.....	19
1. Teori Gender	19
2. Teori Partisipasi Politik	22
3. Teori Pilihan Rasional (<i>Rational Choice</i>)	25
B. Kerangka Konseptual.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data.....	31
E. Teknik Penentuan Informan.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara	35
B. Gambaran Umum Kecamatan Masamba	37
C. Profil Muslimat NU dan Fatayat NU	42
1. Profil Muslimat NU.....	42
2. Visi dan Misi Muslimat NU	43
3. Lambang.....	45
4. Struktur Kepengurusan Muslimat NU Kab. Luwu Utara.....	46
5. Profil Fatayat NU	47
6. Visi dan Misi Fatayat NU	48
7. Lambang.....	49
8. Struktur Kepengurusan Fatayat NU Kab. Luwu Utara	51
D. Polarisasi Pilihan Politik Muslimat NU dan Fatayat NU	52
E. Bentuk Dukungan Muslimat NU dan Fatayat NU Kab. Luwu Utara Pada Ibu Hj. Indah Putri Indriani di Pilkada Serentak Tahun 2015.....	55
1. Bentuk Dukungan Muslimat NU Kab. Luwu Utara Pada Ibu Hj. Indah Putri Indriani di Pilkada Serentak Tahun 2015	55
a. Kampanye Politik.....	57
b. Kontrak Politik Muslimat NU dan Ibu Hj. Indah Putri Indriani	63
2. Bentuk Dukungan Fatayat NU Kab. Luwu Utara Pada Ibu Hj. Indah Putri Indriani di Pilkada Serentak Tahun 2015	73
a. Mobilisasi Kader Fatayat NU	74
b. Mendukung Program Ibu Hj. Indah Putri Indriani	77
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Implikasi Penelitian.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91

ABSTRAK

Nama : Ahmad Aufa Zainal
NIM : 30600114004
Judul : Perempuan NU dan Pilkada (Studi Terhadap Polarisasi Dukungan Politik Muslimat dan Fatayat NU Terhadap Pasangan Indah Putri Indriani-Thahar Rum Di Pilkada Serentak Tahun 2015)

Skripsi ini mengkaji tentang polarisasi dukungan politik dan bentuk dukungan politik Muslimat NU dan Fatayat NU di pilkada serentak Kabupaten Luwu Utara tahun 2015 pada Indah Putri Indriani-Thahar Rum dan yang menjadi fokus penelitian ini adalah Muslimat NU dan Fatayat NU. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memahami polarisasi dukungan dan bentuk dukungan politik yang diberikan oleh Muslimat NU dan Fatayat NU kepada calon Bupati perempuan yakni Indah Putri Indriani-Thahar Rum.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, dengan informan yang meliputi Elit Muslimat NU Kab. Luwu Utara beserta anggota dan Elit Fatayat NU Kab. Luwu Utara beserta anggota yang ditentukan dengan menggunakan teknik *sampling purposive*. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori gender, teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional (*rational choice*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat polarisasi dukungan politik yang diberikan kepada Ibu Indah Putri Indriani-Thahar Rum oleh Muslimat NU dan Fatayat NU Kabupaten Luwu Utara di pilkada serentak tahun 2015 yang lalu. Secara umum dipermukaan dukungan politik yang diberikan oleh Muslimat NU dan Fatayat NU Kab. Luwu Utara kepada Ibu Hj. Indah Putri Indriani hanyalah semu sebab terdapat kepentingan politik yang berbeda antar kedua organisasi ini. Muslimat NU secara tegas memberikan dukungan politik yang penuh kepada Ibu Indah Putri Indriani-Thahar Rum, sedangkan Fatayat NU hanya nampak dipermukaan saja sebab ada kekhawatiran yang dirasakan oleh Fatayat NU yakni berkaitan dengan citra dan netralitas para pengurus dan anggota dari Fatayat NU sendiri. Muslimat NU secara tegas memberikan dukungan politik dalam bentuk kampanye politik dan kontrak politik sedangkan Fatayat NU melakukan mobilisasi massa dan mendukung program Indah Putri Indriani-Thahar Rum. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dengan terpilihnya Ibu Indah Putri Indriani sebagai Bupati Kab. Luwu Utara menunjukkan bahwa kaum perempuan dalam Agama dan ruang publik tidaklah menjadi *the second class* (kelas kedua) atau menjadi satu tingkatan dibawah kaum laki-laki. Untuk itu diharapkan peran dan partisipasi kaum perempuan pada wilayah apapun harus ditingkatkan untuk merangsang kemajuan kaum perempuan itu sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah panjang telah mencatat perjuangan kaum perempuan untuk melawan dominasi kaum laki-laki disetiap sektor kehidupan. Pada pertengahan abad ke-18, sekelompok pemikir internasional yang tercerahkan mulai menantang tirani dari masyarakat-masyarakat feodal yang didasarkan pada hak-hak istimewa turunan yang dimiliki oleh raja-raja, Gereja dan bangsawan-bangsawan. Kritikus tercerahkan ini memunculkan hak-hak manusia sebagai tandingan terhadap hak Ketuhanan milik para raja. Mereka menyuarakan ketidakpuasan dari suatu kelas menengah baru yang menginginkan kemajuan dan sudah bosan dengan ketidaksetaraan-ketidaksetaraan yang ada dalam hirarki feodal yang lama, kaku, dan korup. Ditengah-tengah benih perubahan sosial itu, kaum perempuan mulai memunculkan persoalan tentang ketidaksetaraan yang mereka alami dan mulai menantang tirani laki-laki dalam rumah tangga.¹

Proses panjang perjuangan kaum perempuan diseluruh dunia patut diapresiasi sebagai suatu bentuk perlawanan atas ketidakadilan dalam peran sosial kemasyarakatan tidak mesti seluruhnya dikendalikan oleh kaum laki-laki begitu pula di NU. Kemunculan perempuan NU merupakan transmisi pemikiran dalam tubuh NU

¹ Susan Alice Watkins, Martha Rodrigues dan Marisa Rueda, *Feminisme Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Resist Book, 2007), h. 10.

yang melihat perempuan sebagai bagian yang perlu untuk dipertimbangkan keberadaanya. Perempuan NU adalah individu yang memiliki hubungan secara langsung (gerakan dan ideologi) dengan Nahdatul Ulama (NU) yang kemudian membentuk organisasi keperempuanan dibawah naungan NU. Adapun organisasi keperempuanan NU yaitu Muslimat NU, Fatayat dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU).

NU merupakan sebuah organisasi keagamaan yang berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 H/ 31 Januari 1926. Jam'iyah yang didirikan dengan nama Nahdlatul Ulama ini sejatinya memiliki citra yang membanggakan baik berskala nasional maupun internasional, pada masa awal berdirinya hingga saat ini. Organisasi yang didirikan oleh para Ulama dan Kiai ini bertujuan untuk mempertahankan sekaligus melestarikan ajaran Islam *Ahlussunnah Wal-Jama'ah (Aswaja)*.²

Didirikannya NU oleh para Ulama dan Kiai merupakan wadah yang diperuntukkan bagi pesanteren. Sejak berdirinya tidak terlepas dari pola patriarki yang begitu besar saat itu. Adanya pola patriarki dalam tubuh NU terlihat begitu nyata dengan kaum laki-laki yang secara keseluruhan mendominasi didalamnya sedangkan kaum perempuan termarginalkan dalam organisasi tersebut.

Pada perjalanan NU, isu perempuan semakin mendapatkan perhatian ketika Kiai Dahlan mengusulkan berdirinya organisasi perempuan NU pada kongres NU ke XIII di Menes Banten pada tanggal 11-16 Juni 1938. Kongres ini sangat penting

² Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja Pegangan Para Guru NU*, (Surabaya: Khalista, 2012), h. 1.

karena mulai membicarakan tentang perlunya perempuan mendapatkan kesempatan hak untuk mendapatkan didikan agama melalui NU. Ketika itu kongres baru menyetujui perempuan untuk menjadi anggota NU yang hanya bisa menjadi pendengar dan pengikut dan tidak boleh duduk dalam kepengurusan.³ Pada kongres inilah terdapat beberapa catatan berkaitan tentang kiprah kaum perempuan di forum formal tersebut sehingga kongres tersebut menjadi momentum cikal bakal lahirnya Muslimat NU.

Peran Muslimat NU terhadap kemajuan perempuan Indonesia begitu besar. Bidang-bidang layanan yang menjadi garapannya meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dalam melaksanakan layanan tersebut, maka setiap kegiatan layanan tentunya merujuk pada visi dan misi Muslimat NU. Adapun Visi Muslimat NU adalah terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam *Ahlusunnah wal Jama'ah* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridhai Allah Swt sedangkan misinya yaitu: 1) Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2) Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang berkualitas, mandiri dan bertaqwa kepada Allah Swt. 3) Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai

³ Dewi Anggriani, *Perempuan Dalam Dinamika Beragama: Suatu Tinjauan Antropologi Agama*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 123.

anggota masyarakat. 4) Melaksanakan tujuan *Jam'iyah* NU sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridhoi Allah Swt.⁴

Sejak kelahirannya pada tahun 1946-1952, Muslimat menjadi bagian dari NU. Dalam rentang antara 1904-1952, kegiatan NU ditandai dengan perjuangan kemerdekaan RI. Anggota-anggota NU termasuk Muslimat didalamnya mengambil peran yang cukup penting, seperti di dapur umum, Palang Merah, sebagai kurir penghubung, dan bergabung dengan pasukan-pasukan pejuang seperti Hizbullah dan Sabilillah. Pada Mukhtar NU ke-19 di Palembang, NU meningkatkan dirinya sebagai partai politik yang juga mengubah bentuk organisasi Muslimat menjadi badan otonom dari NU dengan nama baru “Muslimat Nahdlatul Ulama” yang disingkat Muslimat NU. Pada Mukhtar NU ke-20 pada tahun 1954 di Surabaya diselenggarakan kongres pertama Muslimat NU sebagai badan otonom dari NU. Muslimat NU membahas berbagai masalah perempuan, antara lain masalah perkawinan dibawah umur. Perjuangan Muslimat NU dalam masalah perkawinan ditunjukkan dengan mengambil peran dalam pembentukan BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Dalam kongresnya ke-7 di Jakarta pada tahun 1959, Muslimat berhasil menghilangkan tabir dari arena kongres. Keputusan pentingnya yang dicapai adalah mengajukan pernyataan kepada anggota PBNU agar

⁴ Pimpinan Pusat Muslimat NU, *Pedoman Organisasi dan Administrasi Muslimat NU*, (Jakarta: PP Muslimat NU, 2009), h. 3.

anggota Muslimat dapat dicalonkan sebagai calon prioritas untuk anggota DPR, DPRD, dan Konstituante.⁵

Selain Muslimat NU, terdapat organisasi perempuan NU lainnya yang diperuntukkan kepada perempuan muda NU yang disebut Fatayat NU. Fatayat NU lahir secara resmi tanggal 24 April 1950 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1317 H di Surabaya. Pada kongres NU ke-15, ternyata dihadiri juga oleh puteri-puteri kongres NU dari berbagai cabang yang mengadakan pertemuan untuk membentuk Puteri Nahdlatul Ulama Muslimat (Puteri NUM). Di kongres mereka mengusulkan untuk diterima dan disahkan sebagai organisasi yang otonom didalam NU, tapi kongres menyetujui Puteri NUM sebagai bagian dari NUM. Dua tahun kemudian Puteri NUM meminta kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mempunyai pimpinan pusatnya sendiri yang terpisah dari NUM, alasannya karena ditingkat cabang organisasi Puteri NUM terus bertambah. Pada tanggal 26 Rabiul Akhir 1399/ 14 Februari 1950, PBNU menyetujui pembentukan pengurus Puteri NUM yang diberi nama Dewan Pimpinan Fatayat NU.⁶

Fatayat NU merupakan bagian dari Muslimat NU yang tak terlepas dari dinamika peran kaum perempuan ditubuh NU. Kemunculan Fatayat NU menjadi spirit baru perjuangan pemuda NU kala itu yang melihat kompetensi perempuan pada ranah publik tidak kalah saing dengan kaum laki-laki yang secara simbolis kaum laki-

⁵ Khofifah Indar Parawansa, *NU, Perempuan Indonesia: Sudut Pandang Islam Tradisional*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2015), h. 160.

⁶ Dewi Anggriani, *Perempuan Dalam Dinamika Beragama: Suatu Tinjauan Antropologi Agama*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 125.

laki memiliki kekuasaan, kekuatan, pemberani dan lain sebagainya, berbeda dengan kaum perempuan yang tidak mampu melakukan hal yang produktif karena hal tertentu. Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama bertujuan untuk terbentuknya pemuda atau wanita muda Islam yang bertaqwa kepada Allah Swt, berakhlakul karimah, bermoral, cakap, bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, terwujudnya masyarakat yang berkeadilan gender, terwujudnya rasa kesetiaan terhadap asas, aqidah dan tujuan NU dalam menegakkan syariat Islam.⁷

Fatayat NU sebagai salah satu organisasi dibawah naungan Nahdlatul Ulama yang menangani aktifitas perempuan muda keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Nahdlatul Ulama, mengingat organisasi ini cukup menjadi media untuk menyosialisasikan program-programnya dikalangan generasi muda. Melihat suatu kondisi zaman modernisasi global pada saat ini, maka akan lebih baik ketika kegiatan tersebut masih dilestarikan oleh para perempuan muda, guna mengarahkan suatu kebaikan dan juga untuk menambah wawasan ilmu tentang keagamaan, memperkuat pedoman agama dalam menjalani kehidupan, sebagai pedoman untuk generasi perempuan muda dalam menyongsong masa depan. Wanita mempunyai beban yang berat, melestarikan generasi. Karena di pundaknya terdapat kelunakan naluri, Al-Qur'an selalu menghimbau kaum wanita agar berperangai yang baik dan ikhlas dalam beramal, agar Allah senantiasa mencurahkan pertolongan kepadanya dalam

⁷ Arsip Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama, *Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU*, (Sidoarjo: Pimpinan Cabang, 2010), h. 11.

melahirkan generasi baru.⁸ Untuk itu eksistensi ilmu merupakan sarana menuju alam akhirat dan kebahagiaan *ukhrawi* yang juga sebagai perantara mendekatkan diri kepada Allah sang pencipta, sebab hal itu tidak akan tercapai kecuali dengan ilmu yang disertai dengan amal-nya.⁹

Organisasi Fatayat NU bersifat keagamaan, kemasyarakatan, dan kekeluargaan, dalam hal ini pemuda Fatayat NU mempunyai tujuan untuk meningkatkan peranan wanita Indonesia dalam segala bidang kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Islam telah menetapkan bahwa peran utama wanita adalah sebagai Ibu dan pengatur rumah tangga, tetapi di lingkungan masyarakat, peran utama wanita ini mempunyai andil yang besar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan kualitas generasi yang baik.¹⁰ Tugas dan peranan tersebut sejalan dengan kehendak Allah ketika Dia berdialog dengan para malaikat saat Dia menciptakan manusia pertama kali.¹¹

Dewasa ini Perempuan NU pada wilayah publik telah mampu untuk menunjukkan perannya sebagai kaum yang tidak termarginalkan. Khusus pada wilayah politik, Perempuan NU dapat dianggap memiliki peran yang besar mengingat organisasi keperempuanan NU ini yang ada khususnya di Kabupaten Luwu Utara

⁸ Abu Iqbal al-Mahalli, *Muslimah Modern: Dalam Bingkai Al-Qur'an dan Al-Hadits*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), h. 11.

⁹ Kamil Musa, *Anak Perempuan Dalam Konsep Islam*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1994), h. 72.

¹⁰ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 130.

¹¹ Irfan Supandi, *Dahsyatnya Menjadi Ibu Rumah Tangga*, (Surakarta: Jajar Laweyan, 2011), h. 50.

pada pemilihan Bupati pada tahun 2015 berperan aktif. Muslimat dan Fatayat NU merupakan organisasi keperempuanan yang sadar akan partisipasi politik.

Keterpilihan Hj. Indah Putri Indriani sebagai Bupati Luwu Utara tidak terlepas dari peran Muslimat dan Fatayat NU sebagai organisasi keperempuanan yang berasal dari NU. Namun, dibalik semua itu ternyata dukungan tersebut hanyalah nampak dipermukaan saja sebab pada kenyataannya beberapa anggota Muslimat dan Fatayat NU secara pribadi tidak memberikan suaranya pada Hj. Indah Putri Indriani dipilkada serentak Luwu Utara tahun 2015.

Muslimat NU Kabupaten Luwu Utara berkomitmen secara penuh memberikan dukungannya kepada Ibu Hj. Putri Indriani-Thahar Rum bahkan memformalkan dukungan tersebut. Berbeda dengan Muslimat NU, Fatayat NU justru sebaliknya. Dukungan yang diberikan hanyalah sebatas dukungan semu belaka yakni dukungan yang hanya terlihat di permukaan saja karena terdapat pilihan politik yang berbeda yang disebabkan oleh faktor tertentu sehingga terjadi polarisasi dukungan kepada Ibu Hj. Indah Putri Indriani-Thahar Rum dipilkada serentak tahun 2015 yang lalu di Kabupaten Luwu Utara.

Pada pilkada serentak yang lalu, terdapat dua pasangan calon Bupati Luwu Utara tahun 2015 yaitu, pasangan pertama Drs. H. Arifin Junaidi berpasangan dengan Andi Abdullah Rahim, ST dan pasangan kedua yaitu Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.Si berpasangan dengan Muh. Thahar Rum, SH. Kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut didominasi oleh kaum laki-laki dan hanya ada satu dari kaum perempuan yaitu Hj. Indah Putri Indriani sebagai calon Bupati.

Kemunculan kaum perempuan pada kontestasi politik Luwu Utara memiliki makna tersendiri bagi Perempuan NU yaitu kaum perempuan secara politik telah terwakilkan dengan adanya calon dari kaum perempuan. Dalam Islam upaya untuk penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* telah tercatat dalam Al-Qur'an. Penegakan ini tidak merujuk pada salah satu jenis kelamin tetapi kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Pada Q.S Al-Imran/3:110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”¹²

Untuk itu dalam perspektif gender, Muslimat dan Fatayat NU sebagai organisasi Perempuan NU melihat bahwa kaum perempuan memiliki afiliasi tersendiri dan tidak dapat dipungkiri mengingat kaum perempuanpun harus memiliki wakil pada taraf eksekutif di suatu daerah sehingga apa yang selama ini menjadi anomali terhadap pola patriarki yang dialami oleh NU pada saat pertama kali terbentuk tidak lagi terjadi dan dialami oleh perempuan NU pada wilayah diluar dari NU itu sendiri. Namun, sekalipun terdapat calon dari kaum perempuan hal tersebut

¹² Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference Q.S Al-Imran/3:110*, (Bandung: Sygma Publishing, 2010)

bukan berarti seluruh kaum perempuan memilih calon yang berasal dari kaum yang sama (perempuan). Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi kebebasan untuk memilih dan dipilih menjadi suatu konsep yang membuat setiap individu berhak untuk memilih calon berdasarkan pengamatan pribadi.

Pada surah yang lain dalam Al-Qur'an yang lain pun hal yang sama dijelaskan berkaitan tentang bagaimana seorang individu dapat menjadi pemimpin pada suatu daerah sehingga apa yang disebut kesetaraan gender dapat terwujud dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia. Dalam Surah At-Taubah/9:71 berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْتُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”¹³

Dalam hadits sendiri terdapat hal yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang memilih pemimpinnya yaitu pada (HR. Muslim):

¹³ Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference Q.S At-Taubah/9:71*, (Bandung: Sygma Publishing, 2010)

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِي تُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشَرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تَبْغُونَهُمْ وَيَبْغُونَكُمْ وَتُلْعِنُونَكُمْ. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ

Artinya:

“Auf bin Malik r.a., berkata, 'Saya telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda, Sebaik-baiknya pemimpinmu ialah yang kamu cintai dan cinta padamu, dan kamu doakan dan mereka mendoakanmu. Dan sejahat-jahatnya pemimpinmu ialah yang kamu benci dan mereka pun membenci kamu, dan kamu kutuk dan mereka mengutuk kamu.' Sahabat bertanya, "Bolehkah kami menentang (melawan mereka)?" Beliau menjawab, "Tidak selama mereka tetap menegakkan shalat.)”¹⁴

Seorang pemimpin yang arif dan bijaksana tentu akan dijadikan sebagai panutan bagi rakyatnya dan dapat menjadi inspirator. Seorang pemimpin yang dapat berperilaku demikian akan menunjukkan kapasitasnya yang kredibel dan berintegritas sebagai pemimpin yang dapat mengayomi bagi orang banyak. Model pemimpin yang seperti itulah yang akan dipilih oleh rakyat tanpa mengenal status, jenis kelamin dan lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan luasnya cakupan latar belakang masalah yang akan diteliti mengenai “Perempuan NU dan Pilkada (Studi Terhadap Polarisasi Dukungan

¹⁴ M. Rusdi, *Hadis-Hadis Tarbawih 2*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.125.

Politik Muslimat dan Fatayat NU Terhadap Pasangan Indah Putri Indriani-Thahar Rum Di Pilkada Serentak Tahun 2015)” maka muncul permasalahan dan kepentingan persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana polarisasi pilihan politik Muslimat dan Fatayat NU pada Hj. Indah Putri Indriani dipilkada serentak di Kab. Luwu Utara tahun 2015?
2. Bagaimana bentuk dukungan Muslimat dan Fatayat NU pada Hj. Indah Putri Indriani dipilkada serentak Kabupaten Luwu Utara tahun 2015?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana polarisasi pilihan politik Muslimat dan Fatayat NU pada Hj. Indah Putri Indriani dipilkada serentak tahun 2015 Kabupaten Luwu Utara berdasarkan perspektif gender
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk dukungan politik Muslimat dan Fatayat NU pada Hj. Indah Putri Indriani dipilkada serentak tahun 2015 Kabupaten Luwu Utara

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan memiliki nilai manfaat sebagai berikut:

Manfaat Akademik

- a. Memberi sumbangan pemikiran yang mengarah pada pengembangan teori-teori keilmuan, khususnya pada kajian ilmu politik
- b. Memberi wawasan keilmuan dan memperkaya kajian tentang polarisasi dukungan politik Perempuan NU berdasarkan perspektif gender dan keikutsertaan kaum perempuan pada wilayah politik

Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami realitas politik
- b. Sebagai salah satu bahan masukan dan bahan pertimbangan kepada kaum perempuan untuk lebih berperan aktif untuk aktivitas/ kegiatan politik
- c. Hasil penelitian ini dapat pula dijadikan petunjuk dan sebagai bahan acuan bagi aktivitas ilmiah terutama dalam rangka penelitian lebih lanjut
- d. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang hampir relevan dengan tema yang diangkat peneliti yakni sebagai berikut:

1. Skripsi tahun 2013, karya Nurlira Goncing, mahasiswa dari Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, *“Perilaku Elit Politik Nahdlatul Ulama Pasca Orde Baru Di Kota Makassar”* skripsi ini memfokuskan pokok permasalahannya pada perilaku elit politik

Nahdlatul Ulama pasca orde baru di Kota Makassar serta motif yang melatar belakangi perilaku elit politik Nahdlatul Ulama pasca Orde Baru di Kota Makassar. Metode yang digunakan yaitu telaah elit yang khusus pada perilakunya serta metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui riset lapangan yang dipadukan dengan metode pustaka, dengan cara menganalisa berbagai referensi literatur yang memiliki relevansi dengan topik permasalahan yang diangkat dalam skripsi tersebut.¹⁵

2. Skripsi tahun 2016, karya Sri Sumarni Sjahril, mahasiswa dari Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, "*Politik Perempuan Di Kota Makassar*" skripsi ini menganalisis tentang (studi terhadap peran politik perempuan partai Nasdem Kota Makassar). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan masalah penelitian penulis. Hasil dari penelitian ini menggambarkan perempuan nasdem Kota Makassar yang memiliki peran sangat penting dimasyarakat dalam hal memberikan pendidikan politik terhadap anak muda Makassar, selain itu hadirnya perempuan di legislatif bukan hanya ajang untuk merebut kekuasaan, namun bagaimana kekuasaan ini dimaknai sebagai perjuangan untuk memberikan posisi tawar kepada masyarakat marginal. Itu dibuktikan

¹⁵ Nurlira Goncing, "*Perilaku Elit Politik Nahdlatul Ulama Pasca Orde Baru Di Kota Makassar*" *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2013), h. x.

dengan dirancangnya sebuah peraturan daerah mengenai air susu eksklusif dan salah satu pengusungnya ialah kader Partai Nasdem Kota Makassar¹⁶

3. Skripsi tahun 2016, karya Ririn Ramdani, Mahasiswa dari Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, "*Perempuan, Politik, Dan Parlemen Di Kota Makassar*" skripsi ini menganalisis tentang (studi terhadap keterwakilan perempuan pasca pemilu 2014). Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan masalah penelitian penulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi caleg perempuan Kota Makassar periode 2014-2019 pada setiap partai, untuk mengetahui distribusi caleg perempuan Kota Makassar periode 2014-2019 pada setiap dapil, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi minimnya pemenuhan kuota perempuan di parlemen.¹⁷
4. Skripsi tahun 2015, karya Nusrokh Diana, mahasiswi dari Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, "*Kelahiran Muslimat NU*".
Kajian ini difokuskan pada proses historis lahirnya Muslimat NU pada rentang waktu 1938-1952 M. Lebih khusus membahas mengenai upaya

¹⁶ Sri Sumarni Sjahril, "*Politik Perempuan Di Kota Makassar (Studi Terhadap Peran Politik Partai Nasdem Kota Makassar)*" Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2016), h. x.

¹⁷ Ririn Ramdani, "*Perempuan, Politik Dan Parlemen Di Kota Makassar (studi terhadap keterwakilan perempuan pasca pemilu 2014)*", Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2016), h. vii.

perempuan NU dalam mendirikan Muslimat NU di setiap acara Kongres NU. Kajian ini juga berusaha menganalisis apa yang melatarbelakangi bangkitnya perempuan NU untuk mendirikan organisasi perempuan di dalam organisasi tradisional tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi dalam upaya memahami persoalan secara lebih objektif. Penulis berupaya mengungkapkan proses lahirnya Muslimat NU berdasarkan situasi sosial yang terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lahirnya Muslimat NU, saat itu bernama Nahdlatul Oelama Moeslimat (NOM) merupakan sebuah kebangkitan perempuan NU, yang dilatarbelakangi oleh situasi sosial saat itu. Pernyataan ini didasarkan pada kegigihan para perempuan NU yang memerlukan waktu cukup lama dalam upaya membentuk wadah bagi mereka. Upaya untuk membentuk wadah bagi perempuan NU telah ditandai dengan hadirnya Ny. Djunaisih dan Ny. Siti Syarah yang merintis berdirinya Muslimat NU dengan mengeluarkan gagasannya di forum resmi NU, yakni pada acara Kongres NU ke-13 di Menes tahun 1938.¹⁸

5. Skripsi tahun 2013, karya Ahmad Ni'am Shidqi, mahasiswa dari Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, "*Gerakan Pengarusutamaan Gender Fatayat NU Cabang Jepara Jawa Tengah (2000-2007)*". Penelitian ini bertujuan

¹⁸ Nusrokh Diana, "*Kelahiran Muslimat NU*", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, 2015), h. vii.

untuk mendeskripsikan sejarah gerakan perempuan yang diperankan oleh organisasi perempuan muda Nahdlatul Ulama yang disebut Fatayat NU. Metode penelitian ini yaitu metode sejarah, adapun pengumpulan data memadukan antara *field reaserch* dan *library reaserch* dengan menggunakan pendekatan feminisme. Hasil dari penelitian ini yaitu deskripsi mengenai upaya dan peran Fatayat NU dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas anggotanya melalui pelatihan-pelatihan dalam organisasi dan meningkatkan partisipasi dalam masyarakat sebagai wujud nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁹

6. Disertasi tahun 2012, karya Mami Hajaroh, mahasiswa Program Pascasarjana Pendidikan Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, "*Divusi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Fatayat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta*". Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Subyek penelitian adalah anggota Fatayat Nahdlatul Ulama yang duduk dalam kepengurusan Fatayat Nahdlatul Ulama di tingkat cabang, wilayah dan pusat periode tahun 1995-2000, 2000-2005, dan 2005-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa difusi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di Fatayat NU terjadi pada dua level yakni individu dan organisasi. Model

¹⁹ Ahmad Ni'am Shidqi, "*Gerakan Pengarusutamaan Gender Fatayat NU Cabang Jepara Jawa Tengah (2000-2007)*", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, 2013), h. vii.

konseptual difusi kebijakan pada individu ditemukan dengan tahap pengetahuan, persuasi, konfirmasi, keputusan dan implementasi²⁰

Jadi bisa ditarik kesimpulan dari penelitian terdahulu yang dicantumkan di atas, yang menjadi pembeda antara skripsi yang penulis bahas yaitu, penulis lebih fokus pada polarisasi yang terjadi antar Muslimat dan Fatayat NU pada Pilkada serentak tahun 2015 di Kab. Luwu Utara pada Ibu Indah Putri Indriani-Thahar Rum. Sekalipun kedua organisasi perempuan ini berada dalam naungan yang sama yaitu NU namun terdapat cara bertindak yang berbeda pada kontestasi politik yang terjadi.



²⁰ Mami Hajaroh, “*Divusi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Fatayat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta*”, *Disertasi* (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), h. iii.

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Kerangka Teori

Pernyataan yang disebut teori berwujud sekumpulan generalisasi dan dalam generalisasi terdapat konsep-konsep. Maka dapat diartikan bahwa, 1) teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis, 2) teori bukan sekedar kumpulan generalisasi, tetapi teori merupakan pernyataan yang menjelaskan generalisasi itu, 3) sebagai sarana eksplanasi, teori adalah paling efektif. Dalam proses eksplanasi, teori membantu kita mengorganisasikan dan menata fakta yang kita teliti.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teorinya adalah sebagai berikut :

1. Teori Gender

Secara terminologi gender diterjemahkan dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai jenis kelamin. Sejumlah penulis tentang hal ini membedakan antara kata *jender* dan kata *seks* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Jenis kelamin laki-laki identik dengan otonom, independen, ambisi, agresif, mampu mengontrol keadaan, sementara perempuan identik dengan keterikatan, dependen, berkorban, pengasuh anak, dan segala hal yang berkaitan dengan kelamahan lembutan. Istilah *jender* terkadang disamakan dengan

²¹ Kabul Budiyono, *Teori dan Filsafat Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 9.

perempuan, penyamaan antara jender dan perempuan disebabkan oleh keadaan yang paling banyak menyuarakan kepentingan perempuan adalah kaum perempuan.²²

Ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan. Merupakan kesenjangan terhadap hak-hak manusia yang dikenal dengan kesenjangan gender.²³

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.²⁴ Pembentukan gender yang dialami oleh laki-laki dan perempuan banyak sedikit ditentukan oleh beberapa faktor yang ikut membentuknya, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos yang ada didalam masyarakat. Perbedaan jenis kelamin sering dipergunakan masyarakat untuk membentuk pembagian peran (kerja) antara laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut akibatnya terjadilah pembagian peran gender yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik cenderung tidak dapat melakukan hal yang produktif, tidak dapat menghasilkan uang, tidak memiliki kekuasaan, dan pengaruh sehingga peran ini lebih banyak diserahkan kepada kaum

²² Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*, (Yogyakarta: Lab. Ilmu Politik UINAM, 2015), h. 211-212.

²³ Akhmad Dani dan Siti Hadilang, *Penganggaran Pro Poor dan Responsif Gender Cerita Sukses dari Sinjai dan Luwu Timur*, (Makassar: Komite Pemantau Legislatif, 2014), h. 22.

²⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 31.

perempuan, sedangkan peran publik yang cenderung menghasilkan uang, memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar diserahkan kepada kaum laki-laki. Akibat pembagian kerja yang tidak seimbang ini kemudian melahirkan ketimpangan peran laki-laki dan perempuan yang berakibat ketidakadilan gender yang merugikan perempuan.

Perbedaan secara kodrati antara kaum laki-laki dan kaum perempuan merupakan perbedaan yang secara langsung diberikan oleh Tuhan kepada hambanya. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan yang memiliki ciri atau karakteristik dari kedua kaum tersebut yaitu jenis kelamin (*seks*). Untuk lebih memperjelas konsep jenis kelamin (*seks*) dan konsep gender berikut akan dikemukakan secara ringkas mengenai hal tersebut. Unsur yang menjadi pembeda seks adalah alat reproduksi yang dimiliki (biologis) sedangkan unsur pembeda dari gender adalah kebudayaan, seks bersifat kodrati yaitu diberikan secara langsung oleh Tuhan dan tidak dapat dipertukarkan sedangkan sifat gender yaitu harkat, martabat yang dapat dipertukarkan, sumber pemberian seks bersumber dari Tuhan sedangkan gender bersumber dari manusia (masyarakat) yang memberikan label (*labeling*), dan keberlakuan seks berlaku sepanjang masa serta dimana saja sedangkan keberlakuan gender dapat berubah sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh masyarakat.

Konsep gender ini merupakan suatu konsep yang mencoba untuk menempatkan individu baik laki-laki maupun perempuan pada wilayah publik dan domestik tanpa adanya sekat primordial yaitu jenis kelamin (*seks*) sebagai unsur pembeda dalam mengerjakan pekerjaan yang masing-masing jenis kelamin tersebut

dapat mengerjakannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki serta pengetahuan pada bidang tersebut.

Teori ini digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Muslimat dan Fatayat NU merupakan organisasi otonom NU yang mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap pola patriarki. Dalam konteks politik khususnya di Kab. Luwu Utara, kedua organisasi otonom NU ini tidak tinggal diam pada momentum tersebut. Keduanya berani menunjukkan eksistensinya sebagai kaum yang dianggap marginal, tidak berdaya dan tidak dapat melakukan hal produktif namun hal tersebut dapat dibantah dengan menunjukkan peran aktif pada kontestasi pemilihan bupati tahun 2015 di Kab. Luwu Utara dengan melakukan dukungan kecalon kepala daerah saat itu, ini menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak hanya berada pada ranah domestik saja namun dapat berada pada ruang publik sesuai dengan konsep gender.

2. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan bagian yang penting dari sistem demokrasi bagi negara yang menerapkannya. Partisipasi politik individu/ kelompok pada kegiatan atau aktivitas politik, baik itu bersifat aktif maupun pasif serta bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik.

Budiardjo berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.²⁵

Tidak jauh berbeda dengan Budiardjo, Ramlan Surbakti mengatakan yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.²⁶ Pada penjelasan yang lebih jauh lagi tentang partisipasi politik Milbart dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori yaitu sebagai berikut, *pertama*, *apatis*. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*, *spectator*. Artinya, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*, *gladiator*. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.²⁷

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367.

²⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007), h. 140.

²⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, h. 143.

Dalam mode partisipasi politik terdapat tata cara individu/ kelompok melakukan partisipasi politik. Mode ini terbagi menjadi dua bagian besar yaitu, *conventional* dan *unconventional*. Mode *conventional* adalah mode klasik partisipasi politik seperti pemilu dan kegiatan kampanye. Mode partisipasi politik sudah cukup lama ada, tepatnya saja tahun 1940-an dan 1950-an. *Unconventional* adalah mode partisipasi politik yang tumbuh seiring memunculkan gerakan sosial baru (*new social movements*). Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan (*environmentalist*), gerakan perempuan gelombang kedua (*feminist*), Protes mahasiswa (*students protest*), dan terror.

Menurut Nimmo keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu, *pertama*, Peluang resmi, artinya ada kesempatan seseorang terlibat dalam partisipasi politik karena didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara. *Kedua*, Sumber daya sosial, artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. Dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki peluang yang sama berkenaan dengan sumberdaya sosial dan sumberdaya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik. Berkaitan dengan perbedaan demografis, terdapat juga perbedaan dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, agama, dll. *Ketiga*, Motivasi personal, artinya motif yang mendasari kegiatan berpolitik sangat bervariasi. Motif ini bisa sengaja atau tidak disengaja, rasional atau

tidak emosional, diilhami psikologis atau sosial, diarahkan dari dalam diri sendiri atau dari luar, dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.²⁸

Teori partisipasi politik digunakan untuk melihat partisipasi politik Muslimat dan dan Fatayat NU. Partisipasi politik memiliki beberapa kategori yang nantinya dapat dilihat Muslimat dan Fatayat NU masuk pada kategori seperti apa. Kategori tersebut merupakan bagian-bagian dari penjelasan teori ini yang nantinya akan dikaitkan dengan partisipasi politik Muslimat dan Fatayat NU pada pilkada serentak tahun 2015 yang ada di Kab. Luwu Utara.

3. Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Penjelasan teoritis tentang perilaku pemilih (*voting behavior*) didasarkan pada dua model atau pendekatan, yaitu model/pendekatan sosiologi dan model/pendekatan psikologi. Di lingkungan ilmuwan sosial Amerika Serikat, model pertama disebut sebagai mazhab Columbia (*The Columbi School of Electoral Behavior*), sementara model/pendekatan kedua disebut sebagai mazhab Michigan (*The Michigan Survey Research Centre*). Mazhab pertama lebih menekankan peranan faktor- faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang, sementara mazhab kedua lebih mendasarkan faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politiknya.²⁹

Dari dua mazhab tersebut, ada mazhab ketiga yang itu sangat berpengaruh dalam

²⁸ Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Padang: UNP Press Padang, 2012), h. 24.

²⁹ Afan Gaffar, *Javaners Voters, A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), h. 4-9.

perilaku memilih, yaitu mazhab dimana perilaku memilih lebih menekankan pada faktor-faktor rasionalitas.

Fokus perhatian pendekatan teoritis perilaku pemilih yang rasional terletak pada perhitungan biaya dan manfaat (*cost and benefit*). Berdasarkan pendekatan pilihan rasional, yang sangat menentukan pada sebuah kegiatan politik yaitu pilkada bukanlah disebabkan karena adanya ketergantungan terhadap ikatan sosial struktural atau ikatan partai yang kuat, tetapi merupakan sebuah hasil penilaian rasional dari pemilih berdasarkan pengamatannya. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik).

Sebenarnya pendekatan pilihan rasional diadopsi dari ilmu ekonomi. Karena didalam ilmu ekonomi menekankan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini senada dengan perilaku politik yaitu seseorang memutuskan memilih kandidat tertentu setelah mempertimbangkan untung ruginya sejauhmana program-program yang disodorkan oleh kandidat tersebut akan menguntungkan dirinya, atau sebaliknya malah merugikan. Para pemilih akan cenderung memilih kandidat yang kerugiannya paling minim.

Ada faktor situasional yang ikut memengaruhi pilihan politik seseorang. Dengan begitu, para pemilih bukan hanya pasif tetapi juga aktif, bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis tetapi juga bebas bertindak. Faktor-faktor situasional itu bisa berupa isu-isu politik ataupun kandidat yang dicalonkan. Perilaku pemilih tidak harus tetap atau sama, karena karakteristik sosiologis dan identifikasi partai dapat berubah-ubah sesuai waktu dan peristiwa-peristiwa politik tertentu.

Dengan begitu isu-isu politik menjadi pertimbangan yang penting dimana para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaian terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya para pemilih (masyarakat) dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.³⁰

Substansi dasar dari doktrin ini telah dirumuskan oleh James B. Rule, sebagai berikut. *Pertama*, tindakan manusia (*human action*) pada dasarnya adalah instrumen agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan yang sedikit banyak jarak jauh. Untuk manusia, atau untuk kesatuan yang lebih besar, tujuan atau nilai tersusun secara hierarkis yang mencerminkan preferensinya mengenai apa yang diinginkan atau diperlukannya. Hierarkis preferensi ini relatif stabil. *Kedua*, para aktor merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungannya. Informasi relevan yang dimiliki oleh aktor sangat memengaruhi hasil dari perhitungannya. *Ketiga*, proses-proses sosial berskala besar termasuk hal-hal seperti *ratings*, institusi dan praktik-praktik merupakan hasil dari kalkulasi seperti itu. Mungkin akibat dari pilihan kedua, pilihan ketiga, atau pilihan N perlu dilacak.³¹

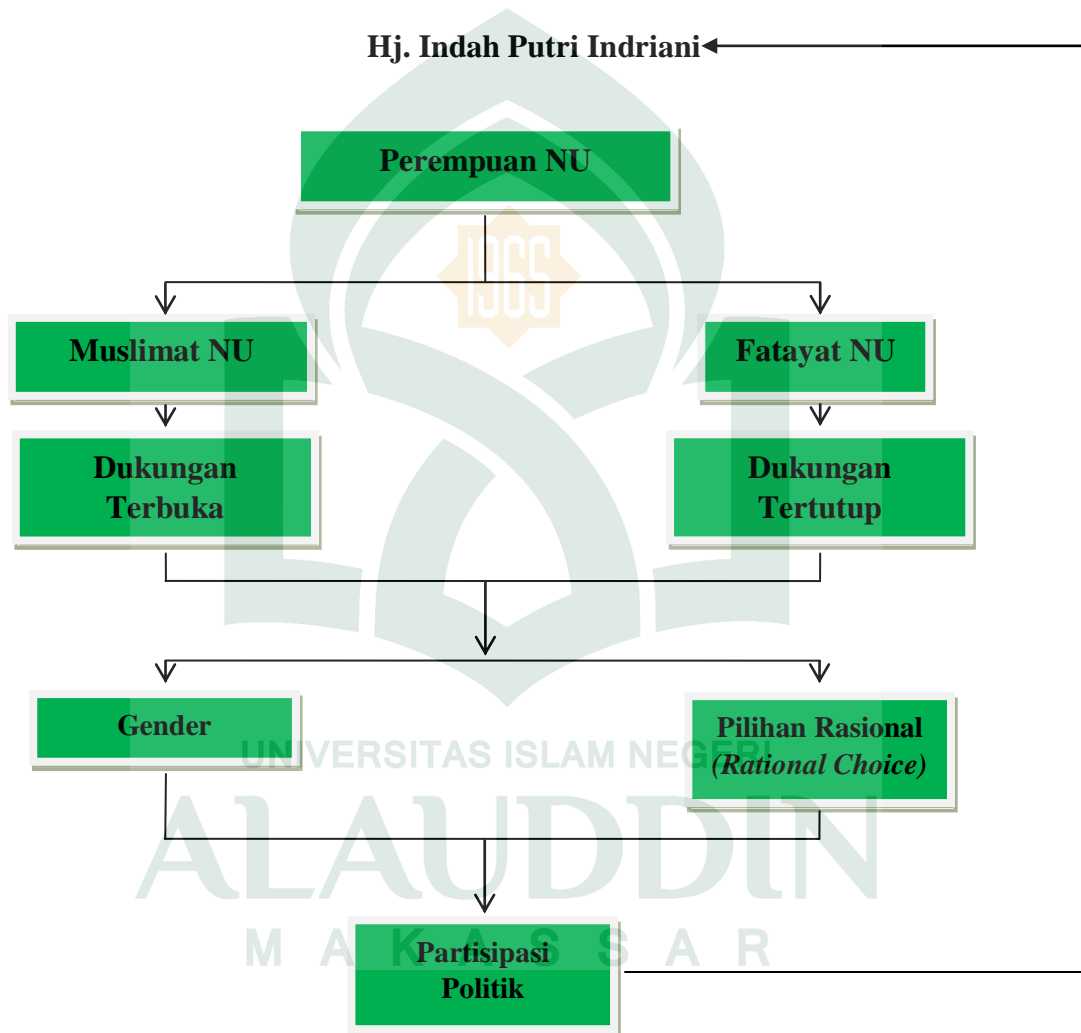
Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mencoba untuk melihat sebagaimana perempuan NU yaitu Muslimat dan Fatayat menggunakan kerasionalitasannya dalam memilih calon Bupati saat itu sebab penekanan dari teori ini adalah menggunakan

³⁰ Ibnu Hajar, *Teori dan Praktek Komunikasi Politik*, (Yogyakarta, Genta Press, 2015), h. 65.

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 93-94.

pengamatan berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh sang calon dan memiliki dampak baik atau buruk kedepannya.

B. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah sebagai prosedur pengkajian masalah-masalah politik untuk memberikan gambaran terhadap kenyataan yang ada sekarang ini secara akurat.³²

Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada keaslian, tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagai mana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.³³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara terjun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang autentik. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam hasil

³² Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 509.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2006), h.16.

penelitian yang akan dilaksanakan nantinya. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Metode observasi merupakan kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit³⁴
2. Metode wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang cukup lama³⁵ guna menggali informasi mengenai pokok permasalahan yang terjadi di lapangan.
3. Metode online merupakan metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan data melalui media online seperti internet, sehingga internet merupakan salah satu medium atau ranah yang sangat bermanfaat bagi penelusuran berbagai informasi dengan cepat mulai dari informasi teoritis maupun data primer dan skunder yang di inginkan untuk kebutuhan penulisan.³⁶ Metode ini akan melengkapi isi skripsi atau membandingkan permasalahan yang terjadi dimedia online dengan kejadian langsung di lapangan.

³⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.

³⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, h. 108.

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, h. 124.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dilakukan sejak awal penelitian hingga penelitian selesai. Untuk menganalisa data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik analisa kualitatif, dengan metode yaitu deskriptif. Analisis ini juga dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan secara lebih terperinci.

Data yang sudah didapat selanjutnya diedit ulang dan dilihat kelengkapannya dan diselingi dengan klasifikasi data untuk memperoleh sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi. Menurut Soedjono dan Addurrahman, analisis ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.³⁷ Analisis ini dimaksudkan melakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam masalah yang hendak dibahas.

Dari kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan pada saat sebelumnya, selama maupun sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum disebut analisis menurut Miles dan Haberman.³⁸

³⁷ Soerjono, dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 13.

³⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 148.

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.³⁹

Reduksi data juga merupakan suatu proses analisis data yang mempermudah peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok yang sedang dianalisis.

2) Display Data (Penyajian Data)

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.⁴⁰

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 247.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 249.

3) *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴¹

E. Teknik Penentuan Informan

Informan Subjek dan informan dalam penelitian ini dimaksud adalah informan peneliti yang berfungsi untuk menjangkau sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan berguna bagi pembentukan konsep dan reposisi sebagai temuan peneliti.⁴²

Proses penentuan informan akan dilakukan dengan cara *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴³

Persyaratan dalam memilih dan menentukan informan dalam penelitian ini:

1. Informan adalah Elit Muslimat NU dan Fatayat NU Kabupaten Luwu Utara yang secara kependudukan berdomisili di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 252.

⁴² Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 206.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 85.

2. Informan adalah individu yang sudah memiliki hak pilih.
3. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang dapat di jangkau serta untuk menghindari terjadinya pengulangan informasi dan data.



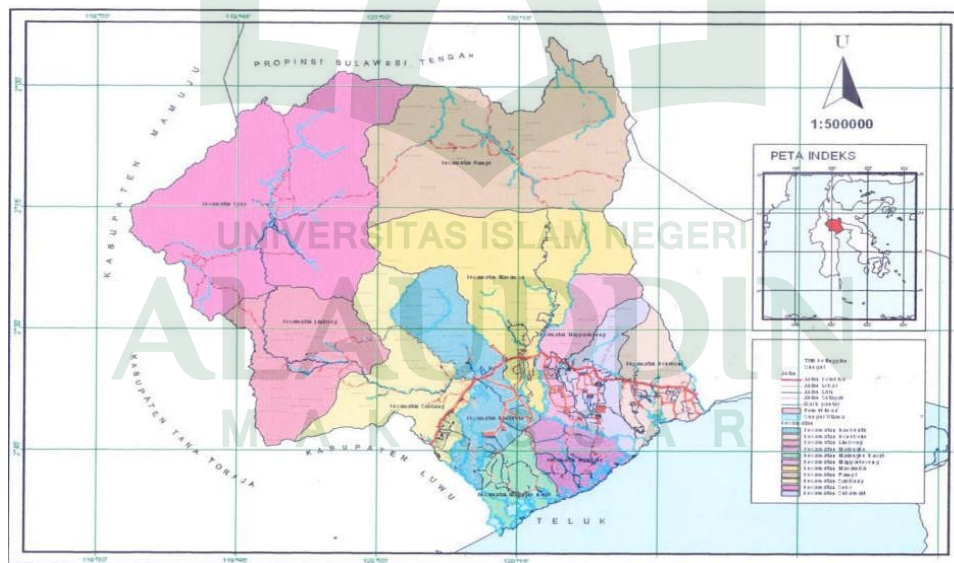
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara*

Ibu Kota Kabupaten Luwu Utara adalah Kecamatan Masamba. Jumlah Kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu Utara sebanyak 12 Kecamatan terdiri dari 172 Desa/UPT dan 7 kelurahan. Kabupaten Luwu Utara memiliki luas wilayah sekitar 7.502,58 Km². Kondisi geografi dan iklim Luwu Utara seperti suhu udara, kelembaban, maupun curah hujan sangat mendukung berlangsungnya kegiatan disektor pertanian.

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Luwu Utara



Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Luwu Utara 2016

Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 wilayah berdasarkan topografinya yaitu wilayah dataran rendah sebanyak 9 kecamatan dengan

ketinggian 15–70 meter di atas permukaan laut dan dataran tinggi sebanyak 3 kecamatan dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini terletak pada posisi $01^{\circ} 53' 19''$ - $02^{\circ} 55' 36''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 47' 46''$ - $120^{\circ} 37' 44''$ Bujur Timur.⁴⁴ Wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 12 wilayah Kecamatan dengan luas masing-masing yaitu:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan (Km²)
Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Menurut Kecamatan (Km ²) Tahun 2016
1.	Sabbang	525.08 Km ²
2.	Baebunta	295.25 Km ²
3.	Malangke	229.70 Km ²
4.	Malangke Barat	214.05 Km ²
5.	Sukamaju	255.48 Km ²
6.	Bone-Bone	127.92 Km ²
7.	Tanalili	149.41 Km ²
8.	Masamba	1.068.85 Km ²
9.	Mappedeceng	275.50 Km ²
10.	Rampi	1.565.65 Km ²
11.	Limbong	686.50 Km ²
12.	Seko	2.109.19 Km ²

Sumber: *Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Luwu Utara 2016*

Luwu Utara memiliki batas-batas yaitu:

⁴⁴ Sumber data *Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Luwu Utara 2016*, 3 Oktober 2017

1. Sulawesi Tengah di Utara
2. Sulawesi Barat dan Tana Toraja di sebelah barat
3. Kabupaten Luwu dan Teluk Bone di sebelah selatan
4. Kabupaten Luwu Timur di sebelah Timur

B. Gambaran Umum Kecamatan Masamba

Kecamatan Masamba merupakan Ibukota Kabupaten Luwu Utara dan sekaligus pusat pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara. Luas wilayah Kecamatan Masamba adalah sekitar 1.068,85 Km². Kecamatan Masamba berbatasan langsung dengan Kecamatan Rampi di sebelah Utara, Kecamatan Mappedeceng di Sebelah Timur, dan Kecamatan Baebunta di sebelah Barat dan Selatan. Pemerintah Kecamatan Masamba membawahi 19 Desa defenitif dan 3 UPT.

Desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Lantang Tallang yang luasnya sekitar 253,99 Km² atau meliputi 23,76 persen luas wilayah Kecamatan Masamba. Adapun wilayah yang mempunyai luas yang kecil adalah UPT Maipi sekitar 2,00 Km² atau hanya 0,19 persen luas wilayah Kecamatan Masamba.

Tabel 2.2
Desa/ Kelurahan Menurut Luas Wilayah (Km²)
Tahun 2016

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Rompu	12,15
2.	Torada	8,20

3.	Pongo	21,00
4.	Pombakka	14,30
5.	Lapapa	10,01
6.	Laba	14,75
7.	Kappuna	21,25
8.	Bone	3,50
9.	Baloli	38,25
10.	Kamiri	30,74
11.	Kasimbong	16,00
12.	Pandak	4,02
13.	Baliase	21,40
14.	Masamba	33,40
15.	Sepakat	89,55
16.	Pincara	183,88
17.	Lantang Tallang	253,99
18.	Sumillin	31,70
19.	Lero	232,25
20.	UPT Maipi	2,00
21.	UPT Sepakat	4,20
22.	UPT L. Tallang	22,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Luwu Utara 2016

1. Kependudukan

Sampai dengan tahun 2016, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Masamba dengan luas wilayah 1.068,85 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 36.051 jiwa, maka tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 34 jiwa per

Km². Dengan kata lain setiap Km luas wilayah di Kecamatan Masamba secara rata-rata hanya didiami oleh 34 orang. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 17.666 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 18.383 jiwa. Dengan demikian maka rasio jenis kelamin adalah sebesar 96 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki.

2. Kesehatan

Di bidang kesehatan, fasilitas dan sarana kesehatan di Kecamatan Masamba relatif memadai jika dibandingkan kecamatan lain. Untuk melayani 22 desa/UPT yang ada, terdapat 1 unit puskesmas, 8 unit pusku, 4 tempat praktek dokter, 5 tempat praktik bidan dan 9 polindes/poskesdes.

Adapun tenaga medis yang terdapat di kecamatan ini terdiri dari 3 orang dokter, 28 bidan, 11 dukun bayi terlatih dan 6 dukun bayi belum terlatih. Jumlah pengunjung puskesmas pada tahun 2016 sebanyak 22.600 pengunjung, dengan pengunjung terbanyak dari Kelurahan Bone, sedangkan jumlah posyandu sebanyak 37 unit dengan 185 kader.

3. Agama

Untuk menunjang kehidupan beragama di Kecamatan Masamba terdapat fasilitas tempat ibadah berupa masjid 69 buah, mushallah 16 buah, dan gereja 5 buah. Berkenaan dengan kewajiban zakat dan infak bagi pemeluk agama islam, pada tahun 2016 di Kecamatan Masamba terkumpul zakat sebanyak Rp. 447.675.000 dan infak Rp.60.000.000. Jumlah jamaah haji yang diberangkatkan pada tahun 2016 terdapat 26

orang terdiri atas 9 orang laki-laki dan 17 orang perempuan.

4. Peternakan Dan Perikanan

Kerbau merupakan hewan ternak besar yang paling banyak terdapat di Kecamatan Masamba. Pada tahun 2016, populasi kerbau mencapai 3.670 ekor. Selain itu juga terdapat sapi 1.899 ekor, kambing 954 ekor. Selain itu, jenis unggas yang paling banyak terdapat adalah ayam ras pedaging dengan populasi 467.000 ekor, ayam petelue 6.000 ekor, dan ayam kampung 89.570 ekor.

5. Pendidikan

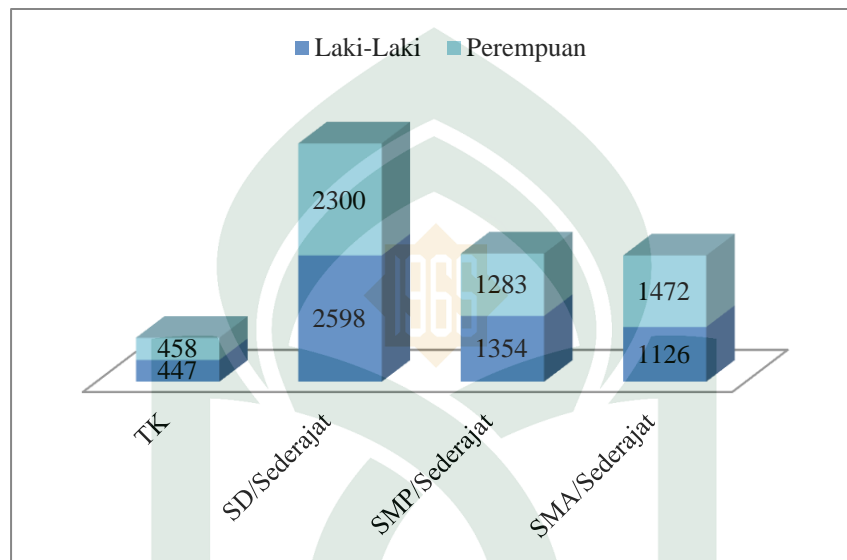
Karena merupakan Ibukota Kabupaten, Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kecamatan ini relatif lebih banyak dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Luwu Utara. Jumlah taman Kanak-Kanak sebanyak 24 unit, Sekolah Dasar dan sederajat sebanyak 26 unit, SLTP sederajat sebanyak 14 unit dan SLTA sederajat sebanyak 7 unit.

Pada Tahun 2016, jumlah total murid tercatat di Kecamatan Masamba sebanyak 11.038 murid, terdiri dari 905 murid Taman Kanak-Kanak, 4.898 murid Sekolah Dasar, 2.637 murid SLTP, 2.598 murid SLTA. Jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah murid laki-laki sebanyak 5.525 murid dan jumlah murid perempuan sebanyak 5.513 murid.

Jumlah total guru di Kecamatan Masamba sebanyak 816 guru, terdiri dari 446 guru tetap dan 370 guru honorer. Jika dilihat per jenjang pendidikan, jumlah guru di jenjang taman kanak-kanak sebanyak 70 guru, Sekolah Dasar sebanyak 376 guru,

SLTP sebanyak 203 guru, dan SLTA sebanyak 167 guru.

Diagram 3.1
Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kecamatan
Masamba
Tahun 2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Luwu Utara 2016

6. Pertanian Perkebunan

Ditunjang oleh kondisi alamnya yang subur, Kecamatan Masamba mempunyai potensi yang besar di bidang pertanian. Pengelolaan sektor pertanian secara optimal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Pada tahun 2016, produksi padi di kecamatan ini dengan luas panen 4.571,5 Ha mencapai produksi 28.206,16 ton GKP.

Untuk tanaman jagung luas panen 755 Ha dengan produksi 4.847,10 ton, dan ubi kayu dengan luas panen 10 Ha yang berproduksi 104,90 ton. Untuk tanaman perkebunan luas tanam kakao 2.702,40 Ha dengan produksi 1.896,28 ton, luas tanam

pohon sagu 179,15 Ha produksi 203,78 ton, kelapa sawit dengan luas areal 838,49 Ha yang mempunyai produksi 10.330,45 ton.

7. Transportasi Dan Komunikasi

Pada tahun 2016, kondisi jalan di Kecamatan Masamba ini relatif paling baik dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Luwu Utara. Dari 22 desa yang ada, baru 11 desa yang sebagian besar permukaan jalannya berupa aspal. Sementara itu, 9 desa sebagian besar jalannya berupa jalan yang diperkeras, dan 2 UPT masih jalan tanah.

Sepeda motor merupakan alat transportasi terbanyak di kecamatan ini. Pada tahun 2016 terhitung sebanyak 8.617 motor. Selain itu terdapat pula 536 mobil pribadi dan 47 mobil umum. Untuk menunjang kegiatan ekonomi, terdapat 84 pick up dan 138 truk di Kecamatan Masamba.⁴⁵

C. Profil Muslimat NU Dan Fatayat NU

1. Profil Muslimat NU

Muslimat NU merupakan salah satu organisasi perempuan di lingkungan Nahdliyin yang menjadikan NU sebagai organisasi induk. Dengan demikian maka dalam keorganisasiannya Muslimat NU mempunyai prinsip keorganisasian yang sama dengan organisasi NU yaitu lebih berpegang teguh kepada doktrin toleransi, akomodatif dan berupaya memperjuangkan tradisi pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia. Dengan demikian, NU menetapkan diri sebagai pengawas tradisi dengan mempertahankan paham *Ahlu*

⁴⁵ Sumber data *Kecamatan Masamba Dalam Angka 2016*, 3 Oktober 2017

Sunnah wal Jama'ah.⁴⁶

Organisasi ini bernama Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU merupakan badan otonom dari *Jam'iyah* Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 26 Robi'ul Akhir 1365 H bertepatan dengan 29 Maret 1946 M di Purwokerto untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pimpinan pusat Muslimat NU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Muslimat NU beraqidah Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan mengikuti salah satu madzhab empat: Hanafi, Syafi'i Hambali dan Maliki. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Muslimat NU berasas dan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.⁴⁷

2. Visi dan Misi Muslimat NU

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial keagamaan maka Muslimat NU memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi Muslimat NU adalah terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam *Ahlusunnah wal Jama'ah* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridhai Allah Swt. Sedangkan misi Muslimat NU adalah :

- a) Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁴⁶ Fathurin Zen, *NU: Politik Analisis Wacana Media*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), h.15.

⁴⁷ Pimpinan Pusat Muslimat NU, *Pedoman Organisasi dan Administrasi Muslimat NU*, *Pedoman Organisasi dan Administrasi Muslimat NU*, (Jakarta: PP Muslimat NU, 2009), h. 2.

- b) Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang berkualitas, mandiri dan bertaqwa kepada Allah Swt.
- c) Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.
- d) Melaksanakan tujuan *Jam'iyah* NU sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridhoi Allah Swt.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka Muslimat NU menentukan strategi sebagai berikut :

- a) Mempersatukan gerak kaum perempuan Indonesia, khususnya perempuan Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*.
- b) Meningkatkan kualitas Perempuan Indonesia yang cerdas, terampil, dan kompetitif, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Agama, Bangsa, Negara dan membentuk generasi penerus bangsa yang taat beragama.
- c) Bergerak aktif dalam kegiatan pelayanan masyarakat di bidang :
 - a. Peribadatan, dakwah, dan penerangan
 - b. Sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup
 - c. Pendidikan
 - d. Hukum dan Advokasi
 - e. Usaha kemasyarakatan lainnya yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi
- d) Meningkatkan jejaring dan kerjasama dengan badan-badan lembaga/

organisasi lain yang tidak bertentangan dengan visi dan misi organisasi.⁴⁸

3. Lambang

Lambang Muslimat NU :

Gambar 1.2
Lambang Muslimat NU



Arti lambang :

- a) Bola dunia terletak ditengah-tengah berarti tempat kediaman untuk mengabdikan dan beramal guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
- b) Tali yang mengikat berarti agama Islam sebagai pengikat kehidupan manusia, untuk meningkatkan agar selalu tolong menolong terhadap sesama dan meningkatkan taqwa kepada Allah Swt.
- c) Lima bulan bintang diatas, yang terbesar dipuncak berarti: Sunnah Rasulullah SAW yang diikuti dengan setia oleh empat sahabat besar: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Radhiyallah'anhum.

Arti seluruh bintang yang berjumlah Sembilan buah yaitu: Walisongo atau Wali Sembilan yang berarti dalam berdakwah meneladani tata cara Wali Songo, yakni

⁴⁸ Pimpinan Pusat Muslimat NU, *Pedoman Organisasi dan Administrasi Muslimat NU*, *Pedoman Organisasi dan Administrasi Muslimat NU*, (Jakarta: PP Muslimat NU, 2009), h. 3-4.

cara damai dan bijaksana tanpa kekerasan.

Arti Warna :

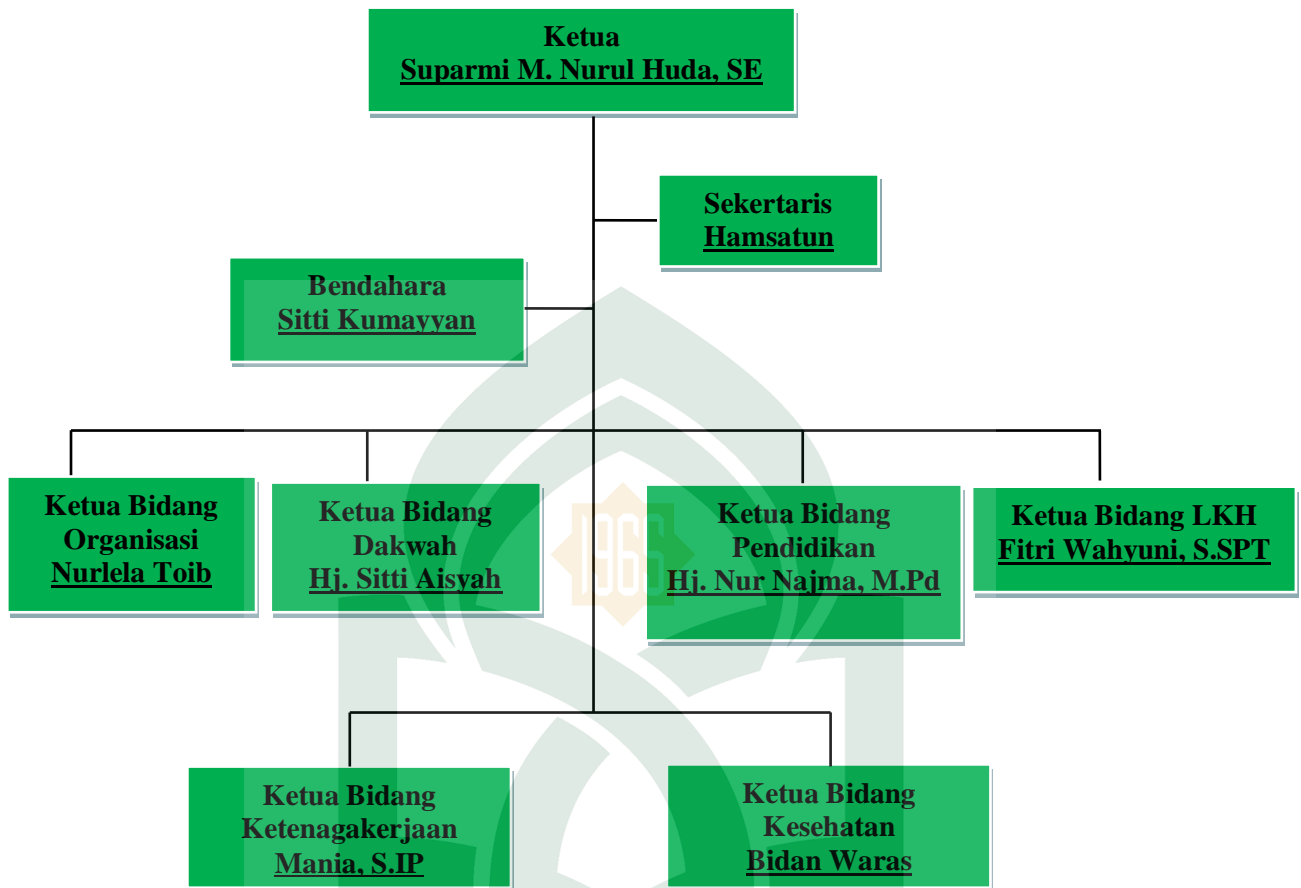
- a) Putih melambangkan ketulusan dan keikhlasan.
- b) Hijau melambangkan kesejukan dan kedamaian.
- c) Tulisan Nahdlatul Ulama berarti: Muslimat NU bagian yang senantiasa meneruskan dan mencerminkan perjuangan ulama.⁴⁹

4. Struktur Kepengurusan Muslimat Kabupaten Luwu Utara

Sebagai organisasi yang ada ditingkat Kabupaten yang disebut Pimpinan Cabang, Muslimat NU Kabupaten Luwu memiliki pengurus ditingkat Kecamatan yang disebut Majelis Wakil Cabang. Pada tingkat ini setiap Kecamatan memiliki struktur tersendiri yang diatur oleh AD/ART organisasi. Di Kabupaten Luwu Utara sendiri terdapat Majelis Wakil Cabang diantaranya adalah Kecamatan Masamba, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Malangke. Sama seperti Majelis Perwakilan Cabang, Pimpinan Cabang juga memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara, dan berbagai bidang di dalamnya. Diantaranya sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁹ Pimpinan Pusat Muslimat NU, *Pedoman Organisasi dan Administrasi Muslimat NU*, *Pedoman Organisasi dan Administrasi Muslimat NU*, (Jakarta: PP Muslimat NU, 2009), h. 4-5.

⁵⁰ Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Luwu Utara



5. Profil Fatayat NU

Fatayat NU lahir secara resmi tanggal 24 April 1950 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1317 H di Surabaya. Pada kogres NU ke-15, ternyata dihadiri juga oleh puteri-puteri kongres NU dari berbagai cabang yang mengadakan pertemuan untuk membentuk Puteri Nahdlatul Ulama Muslimat (Puteri NUM). Di kongres mereka mengusulkan untuk diterima dan disahkan sebagai organisasi yang otonom didalam NU, tapi kongres menyetujui Puteri NUM sebagai bagian dari NUM. Dua tahun kemudian Puteri NUM meminta kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mempunyai pimpinan pusatnya sendiri yang terpisah dari NUM,

alasannya karena ditingkat cabang organisasi Puteri NUM terus bertambah. Pada tanggal 26 Rabiul Akhir 1339/ 14 Februari 1950, PBNU menyetujui pembentukan pengurus Puteri NUM yang diberi nama Dewan Pimpinan Fatayat NU.⁵¹

Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama bertujuan untuk terbentuknya pemuda atau wanita muda Islam yang bertaqwa kepada Allah Swt, berakhlakul karimah, bermoral, cakap, bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, terwujudnya masyarakat yang berkeadilan gender, terwujudnya rasa kesetiaan terhadap asas, aqidah dan tujuan NU dalam menegakkan syariat Islam.⁵²

6. Visi dan Misi Fatayat NU

Fatayat Nahdlatul Ulama merupakan Organisasi bagi para perempuan muda yang mempunyai tujuan dan cita-cita seperti pada uraian yang telah disebutkan pada pembahasan di atas, dengan demikian organisasi ini juga mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuan dan cita-citanya, adapun Visi dan Misi Fatayat Nahdlatul Ulama yaitu:

a. Visi Fatayat NU

Penghapusan segala bentuk kekerasan, ketidakadilan dan kemiskinan dalam masyarakat dengan mengembangkan wacana kehidupan sosial yang konstruktif, demokratis dan berkeadilan jender.

⁵¹ Dewi Anggriani, *Perempuan Dalam Dinamika Beragama: Suatu Tinjauan Antropologi Agama*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 125.

⁵² Arsip Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama, *Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU*, (Sidoarjo: Pimpinan Cabang, 2010), h. 11.

b. Misi Fatayat NU

Membangun kesadaran kritis perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender.

Visi dan misi diatas adalah untuk mencapai tujuan dan harapan dalam mempertahankan organisasinya. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Fatayat Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama berideologi Pancasila.⁵³

7. Lambang

Setiap organisasi atau perkumpulan mempunyai lambang sebagai simbol yang menggambarkan asas atau dasar, tujuan dan cita-cita dari organisasi tersebut. Lambang juga dapat dijadikan sebagai identitas dari organisasi tertentu. Lambang organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama dapat di uraikan sebagai berikut.

⁵³ Arsip Fatayat Nahdlatul Ulama, *Selayang Pandang Fatayat NU*, (Jakarta: Transformatika, 2007), h. 1.

Gambar 1.3
Lambang Fatayat NU



Arti Lambang:

1. Setangkai bunga melati melambangkan niat yang suci,
2. Tegaknya bunga melati diatas dua helai daun berarti dalam setiap gerak langkahnya Fatayat NU tidak lepas dari bimbingan NU dan Muslimat NU,
3. Di dalam sebuah bintang berarti gerak langkah, Fatayat NU selalu berlandaskan perintah Allah SWT dan sunnah Rasul,
4. Delapan bintang berarti empat khalifah dan empat madzab,
5. Dilingkari oleh tali persatuan berarti Fatayat NU tidak keluar dari Ahlussunnah Wal Jama'ah,
6. Fatayat NU adalah organisasi pemuda atau perempuan muda Islam yang berhaluan Ahlussunnah Waljamaah,
7. Dilukis dengan warna putih diatas warna dasar hijau berarti kesucian dan kebenaran⁵⁴

⁵⁴ Arsip Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama, *Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU*, (Sidoarjo: Pimpinan Cabang, 2010), h. 1.

8. Struktur Kepengurusan Fatayat NU Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan surat keputusan Pimpinan Pusat Fatayat NU tentang susunan pengurus Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Luwu Utara dengan masa Khidmat 2013-2018 maka ditetapkan pengurus sebagai berikut:⁵⁵

Penasehat : Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Luwu Utara

Pembina : Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nu Kabupaten Luwu Utara
: Ny. Hj. Rafika Arifin
: Ny. Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.Si

Pengurus Harian

Ketua : Hj. Nur Najmah, S.Ag, M.Pd
Wakil Ketua I : Sumami Sholeh Ahmad, S.Ag
Wakil Ketua II : A. Nur Aeni Middin, S.Ag

Sekretaris : Mania, S.IP
Wakil Sekretaris : A. Etryani

Bendahara : Anna Sofwanawati Yahya
Wakil Bendahara : Rosmayanti

Bidang-Bidang

Bidang Pengembangan Organisasi dan Pengkaderan

Koordinator : St. Musdalifa Ibrahim, S.Ag

Bidang Hukum, Politik dan Advokasi

Koordinator : Syarifah, S.Pd.I

Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Koordinator : A. Muliati, S.Kp

Bidang Sosial Ekonomi

Koordinator : A. Tenri Abeng, S.Sos

⁵⁵ Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Luwu Utara

Bidang Dakwah

Koordinator : Nur Asia, S.Pd

Bidang Pemeliharaan dan Pemberdayaan

Koordinator : Dra. Nurpa, M.Pd

D. Polarisasi Pilihan Politik Muslimat NU Dan Fatayat NU Kabupaten Luwu Utara

Polarisasi menurut KBBI yaitu pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan. Berdasarkan pengertian tersebut antar kedua organisasi NU yaitu Muslimat dan Fatayat NU pada pilkada serentak tahun 2015 yang lalu di Kab. Luwu Utara memang memberikan dukungan yang hanya nampak dipermukaan saja, seperti yang penulis telah sampaikan diatas bahwa dukungan tersebut tidaklah diberikan kepada Ibu Hj. Indah Putri Indriani secara keseluruhan. Ada anggota dari kedua organisasi ini yang tidak memilih Ibu Hj. Indah Putri Indriani. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Najma:

“Yang tidak mendukung paling hanya berapa persen saja. Kita tidak bisa langsung hitung angka pastinya dan kita ketahui itu namum jumlahnya pasti sangat kecil”⁵⁶

Memberikan dukungan politik memang adalah hak setiap individu, bagi organisasi yang berada dalam satu naungan yang sama bukan berarti setiap anggotanya memiliki kesamaan pilihan politik kepada calon kepala Daerah. Terdapat faktor tertentu yang menyebabkan mengapa para anggota Muslimat dan Fatayat NU hanya menampakkan di permukaan saja dukungan tersebut, salah satu diantaranya

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Najma (Ketua Fatayat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 27 September 2017

adalah adanya intervensi yang dilakukan oleh *incumbent* untuk memilih dirinya kembali. Intervensi tersebut dirasakan oleh pegawai Pemda Kab. Luwu Utara bahwa harus memilih *incumbent* yaitu Bapak Drs. H. Arifin Junaidi untuk dapat kembali menjadi Bupati Kab. Luwu Utara. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Mania:

“Secara tidak langsung memang terdapat hal yang demikian tetapi kita juga harus pandai, tidak boleh dijadikan sebagai alat politik”⁵⁷

Hal senada pun disampaikan oleh Ibu Nurlela:

“Yang pegawai-pegawai itu takut sama Bupati yang dulu (Arifin Junaidi) karena takut nanti dimutasi terus dipindahkan ke tempat yang jauh makanya mereka yang tidak memilih Ibu Indah hanya di depan saja nampak berikan dukungan ke Ibu padahal sebenarnya tidak”⁵⁸

Bukan berarti intervensi yang dilakukan oleh *incumbent* saat itu memberikan rasa takut kepada kaum perempuan khususnya Muslimat dan Fatayat NU yang berkarir di bidang Pemerintahan. Justru hal yang sangat mengejutkan terjadi yaitu kemenangan yang dirasakan oleh kaum perempuan itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh penulis ternyata perolehan suara Ibu Hj. Indah Putri Indriani sangatlah tinggi yaitu 90.824 suara dibanding *incumbent* yaitu 78.614 suara. Untuk selanjutnya dapat dilihat perolehan suara antar kedua calon berdasarkan Kecamatan:

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Mania (Sekertaris Fatayat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 26 September 2017

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Nurlela (Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 27 September 2016)

Tabel 2.3
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Kab. Luwu Utara
Periode 2016-2021

No.	Kecamatan	Perolehan Suara (Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.Si dan Muh. Thahar Rum, SH)	Perolehan Suara (Drs. H. Arifin Junaidi dan Andi Abdullah Rahim, ST)	Jumlah Suara Sah Calon
1.	Baebunta	14.301	10.975	25.276
2.	Bone-Bone	9.005	5.176	14.181
3.	Limbong	991	1.109	2.100
4.	Malangke	6.817	7.981	14.798
5.	Malangke Barat	5.841	7.734	13.575
6.	Mappedeceng	7.433	6.001	13.434
7.	Masamba	9.507	9.122	18.629
8.	Rampi	983	721	1.704
9.	Sabbang	10.472	10.651	21.123
10.	Seko	4.437	2.916	7.353
11.	Sukamaju	13.709	11.151	24.860
12.	Tana Lili	7.328	5.077	12.405
Jumlah Akhir		90.824	78.614	169.438
		53,60%	46,40%	

Sumber: KPU Kab. Luwu Utara

Berdasarkan data bahwa perolehan suara Ibu Hj. Indah Putri Indriani sangat jauh diatas dibandingkan Bapak Arifin Junaidi. Kekuatan *incumbent* ternyata dapat dikalahkan dengan kekuatan yang solid diberikan kepada Ibu Hj. Indah Putri Indriani. Khususnya Muslimat dan Fatayat NU memberikan kebaharuan corak berfikir kepada masyarakat terutama dari kalangan Nahdyyin. Ada pola yang sama dilakukan oleh kedua organisasi ini yaitu bermula dari membentuk keluarga kemudian keluar ke masyarakat menyatukan persepsi dan pemahaman berkaitan dengan pemimpin yang senantiasa berbuat untuk rakyat dan mengedepankan kepentingan bersama bukan kepentingan kelompok.

Dengan adanya pemahaman akan kedudukan perempuan di wilayah publik khususnya politik, tidak lagi perempuan menjadi *the second class* (kelas kedua) yang berada satu tingkat dibawah kaum laki-laki. Muslimat dan Fatayat NU telah sadar akan hal tersebut untuk itu diperlukan kedepannya komitmen dan mempersiapkan generasi yang memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemimpin yang berasal dari kaum perempuan lagi dan tentu mengetahui secara detail keinginan, permasalahan, dan tentu cita-cita dari kaum perempuan itu sendiri.

E. Bentuk Dukungan Muslimat NU dan Fatayat NU Kabupaten Luwu Utara Pada Ibu Hj. Indah Putri Indriani di Pilkada Serentak Tahun 2015

1. Bentuk Dukungan Muslimat NU Kabupaten Luwu Utara Pada Ibu Hj. Indah Putri Indriani di Pilkada Serentak Tahun 2015

Ide bahwa politik bukan wilayah perempuan adalah ide yang selalu didengungkan semala berabad-abad, dan ternyata memang sangat efektif untuk membatasi perempuan untuk tidak memasuki wilayah ini. Terminologi publik dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, peran gender, dan stereotipe, telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan diantara perempuan dan laki-laki. Akibat yang paling jelas dari situasi politik seperti itu adalah marginalisasi dan pengucilan perempuan dari kehidupan politik formal. Ini artinya, keberadaan perempuan dalam kehidupan politik formal dibanyak tempat memperlihatkan gambaran yang tidak menggembirakan. Akar dari semua persoalan tersebut adalah budaya patriarki yang menghambat semua ruang gerak perempuan disemua bidang termasuk juga dibidang politik. Dalam artian politik yang konvensional, politik hanya dilihat semata-mata sebagai kegiatan *how to exercise the power* yang membatasi lingkup aktivitas politik hanya semata-mata pada aktivitas seperti *voting* (pemungutan suara), *lobby* (lobi), *campaign* (kampanye), dan lainnya yang sejenis.⁵⁹

Namun hal tersebut justru berbanding terbalik yang ada di Kab. Luwu Utara, pasalnya kaum perempuan secara umum yang ada di Kabupaten tersebut mampu untuk mendobrak pola patriarki yang ada selama ini terjadi dan hal tersebut dapat terbukti dengan terpilihnya Hj. Indah Putri Indriani sebagai Bupati Kab. Luwu Utara yang notabenenya adalah berasal dari kaum perempuan dan membuat banyak pihak kagum sebab ini adalah kali pertamanya di Sulawesi Selatan ada Bupati yang berasal

⁵⁹ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: Kompas, 2005), h. 25-26.

dari kaum perempuan. Hal tersebut bukanlah tanpa sebab, semua pihak memiliki peran masing-masing termasuk organisasi keperempuanan yang berasal dari NU yaitu Muslimat dan Fatayat NU.

Sebagai individu yang memiliki hak politik untuk memilih, para anggota dari Muslimat dan Fatayat NU menggunakan hak pilihnya sebagai bagian dari partisipasi politiknya, namun tidak semua dari anggota Muslimat dan Fatayat NU memberikan dukungan politiknya ke Hj. Indah Putri Indriani yang disebabkan oleh faktor tertentu. Adapun bentuk dukungan yang diberikan oleh Muslimat NU Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

1. Kampanye Politik

Kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisir oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Mengubah sikap dan perilaku seseorang agar bisa menerima apa yang disampaikan, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah apalagi kalau ingin mengubah sikap dan kepercayaan seseorang terhadap apa yang telah diyakininya selama ini.⁶⁰

Di era demokrasi seperti ini, wacana kepemimpinan perempuan sepertinya sudah menemukan tempat dan peluang untuk mengambil peran sebagai pengambil kebijakan dan keputusan. Seperti halnya Muslimat NU, dewasa ini Muslimat NU tidak lagi berkutat pada wilayah spiritual keagamaan saja namun lebih dari itu, di ruang publik khususnya politik Muslimat NU menjadi bagian didalamnya karena peran dan

⁶⁰ Ibnu Hajar, *Teori dan Praktek Komunikasi Politik*, (Yogyakarta, Genta Press, 2015), h. 26.

posisinya. Pada Pilkada serentak tahun 2015 yang lalu, Muslimat NU menjadi pioner untuk mengkampanyekan Ibu Hj. Indah Putri Indriani dan Bapak Thahar Rum untuk terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kab. Luwu Utara. Organisasi otonom NU ini secara aktif mengkampanyekan pasangan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Muslimat NU Kab. Luwu Utara bernama Ibu Parmi:

“Kami semua pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan pengajian, pimpinan-pimpinan Yasinan, pimpinan-pimpinan tahlinan secara bersama-sama soan ke Ibu (Hj. Indah Putri Indriani) untuk mendukungnya dan siap untuk mengkampanyekan beliau dengan cara turun ke masyarakat secara langsung”⁶¹

Aktifitas yang dilakukan oleh Muslimat NU dan beberapa Tokoh Agama untuk mendukung secara langsung dan siap untuk memenangkan Ibu Hj. Indah Putri Indriani merupakan bentuk partisipasi politik konvensional karena secara langsung terlibat didalamnya dan salah satu bentuk dari partisipasi politik konvensional adalah melakukan kampanye politik.

Selama menjabat sebagai Wakil Bupati hingga menjadi Bupati Kab. Luwu Utara, Ibu Hj. Indah Putri Indriani sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kab. Luwu Utara. Ibu Hj. Indah Putri Indriani memiliki kuasa untuk memproduksi wacana berkaitan dengan kepemimpinan kaum perempuan yang konstruktif dalam perpolitikan Daerah sehingga dengan mudah masuk ke tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya itu, Ibu Hj. Indah Putri Indriani berkomunikasi dengan baik kesemua pihak tanpa memandang latar belakang seseorang/ kelompok sehingga masyarakat

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Parmi (Ketua Muslimat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 26 September 2017

merasa simpati kepada beliau. Selain itu beliau juga intens bermitra dengan siapa saja termasuk dari kalangan NU dan khususnya Muslimat NU. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Alwi selaku Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara.

“Ibu Indah itu sebelum mau menjadi Bupati memang selalu berkomunikasi dengan kita jadi dari situ kita dapat lihat bahwa kehadirannya disetiap kegiatan kami bukan semata-mata mau mencari dukungan baru datang ke kita. Jadi selama ini tidak ada perubahan terhadap Ibu Indah, justru malah lebih terbuka, cepat dilayani dan setiap diundang untuk menghadiri kegiatan keagamaan beliau selalu menyempatkan untuk hadir setiap kegiatan kita. Nah dari situ kita merasa bersimpati dengan beliau”⁶²

Hal serupa pun disampaikan oleh Ibu Indarwati:

“Ibu Indah itu sebelum Pilkada memang sangat rajin komunikasi dengan kita. Istimewahnya Ibu itu biar malam dan Ibu sudah tidur tapi kalau kita (Muslimat) yang datang mau bertemu langsung itu dia terima kami. Bahkan setelah Pilkada lebih bagus Ibu itu tidak ada yang beda. Makanya kami rela untuk mengkampanyekan”⁶³

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Alwi dan Ibu Indarwati sebenarnya merupakan apresiasi yang diberikan kepada Ibu Hj. Indah Putri Indriani sebab beliau memang memiliki ketulusan untuk bekerja terhadap masyarakat yang ada di Kab. Luwu Utara. Muslimat NU yang seluruhnya adalah kaum perempuan, dapat menjadi kekuatan bagi kaumnya sendiri dan untuk kemajuan kaumnya sendiri selama mampu untuk tetap solid disetiap keadaan. Solidaritas antara wanita bisa menjadi daya pengubah yang kuat dan dapat mempengaruhi perkembangan hari esok dengan cara

⁶² Wawancara dengan Ibu Alwi (Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 26 September 2017

⁶³ Wawancara dengan Ibu Indarwati (Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 27 September 2017

yang menguntungkan, tidak hanya bagi wanita tapi juga bagi laki-laki. Namun, solidaritas semacam ini harus digalang diatas dasar pemahan yang jelas tentang apa yang tengah berlangsung di negara-negara miskin agar tidak dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan lain yang secara diametrik berlawanan dengan makna keadilan dan kemerdekaan bagi semua orang.⁶⁴

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya antara laki-laki dan perempuan hanya memiliki perbedaan kodrati saja yaitu hanya perbedaan jenis kelamin, tetapi tidak memiliki perbedaan terhadap kedudukan didalam struktur sosial. Perempuan yang ingin berkiprah di lingkungan publik, masih sulit melepaskan diri dari tanggungjawab di lingkungan domestik. Perempuan dalam hal ini kurang berdaya untuk menghindar dari beban ganda tersebut karena tugasnya sebagai pengasuh anak sudah merupakan persepsi budaya secara umum. Kontrol budaya agaknya lebih ketat kepada perempuan daripada laki-laki.⁶⁵ Namun, dengan adanya gelar pendidikan yang dinobatkan kepada seorang perempuan yang memberikan tanda bahwa seseorang tersebut merupakan suatu *ikhtiar* untuk melakukan perlawanan kepada kaum laki-laki yang selama ini mendominasi disemua sektor termasuk wilayah politik.

Ibu Hj. Indah Putri Indriani mampu untuk membuktikan bahwa kaum perempuan tidak selamanya harus berada di wilayah domestik saja dan juga tidak harus dimarginalkan. Kaum perempuan juga berhak untuk berpendidikan tinggi

⁶⁴ Nawal El Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Terj. Zuhilmiyadari Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. XXI.

⁶⁵ Nasaruddin Umar, *Arguman Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 76.

seperti Ibu Hj. Indah Putri Indriani ini. Selain itu, Ibu Hj. Indah Putri Indriani ini yang pernah menjadi Dosen Pascasarjana UI juga berjanji akan memberikan jaminan beasiswa dari SD hingga SMA bagi warganya, agar masyarakat Luwu Utara menjadi tercerahkan dengan pendidikan yang layak di Luwu Utara.⁶⁶ Hal ini tentu bertujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi selanjutnya untuk berbuat yang terbaik untuk negeri sendiri tanpa ada jenis kelamin yang harus terdiskriminatifkan. Antara laki-laki dan perempuan sama kedudukannya, keduanya berhak untuk menjadi siapa saja di wilayah publik.

Selain itu untuk menunjang aktifitas dalam proses berkampanye, Muslimat NU senantiasa menghaturkan do'a kepada Ibu Hj. Indah Putri Indriani dan Thahar Rum. Secara sederhana do'a merupakan wujud penyadaran atas diri yang tidak mempunyai daya dan upaya terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan ini, setiap manusia senantiasa meminta dan memohon kepada Allah Swt guna tujuan tertentu. Di kalangan awam, do'a terhaturkan apabila seseorang/kelompok berada dalam keadaan cemas terhadap keadaan *fana'* (kehancuran). Namun apabila do'a terhaturkan dan terpancar keyakinan bahwa Yang Maha Esa dan Maha Benar itu pasti ada, maka Allah Swt mengabulkan permintaan hambanya yang benar-benar bertaqwa kepada-Nya.

Hal inilah yang menjadi bekal Muslimat NU Kab. Luwu Utara untuk mendukung Ibu Hj. Indah Putri Indriani pada Pilkada serentak tahun 2015 yang lalu.

⁶⁶ <https://news.detik.com/berita/3144812/indah-putri-indriani-bupati-perempuan-pertama-di-sulsel> (Diakses Pada 19 November 2017 Pukul 19.25 WITA)

Melalui do'a pula, Muslimat NU mendeklarasikan diri untuk mendukung beliau sebagai calon Bupati Kab. Luwu Utara periode 2016-2021. Hampir disetiap kegiatan yang dilakukan oleh Muslimat NU Kab. Luwu Utara mereka menyempatkan untuk mendo'akan beliau ataupun ketika bertemu secara langsung. Hal ini pun diperjelas oleh Ketua Muslimat NU Kab. Luwu Utara yang pernyataannya sebagai berikut:

“Saya sampaikan ke Ibu (Hj. Indah Putri Indriani). Ibu hati saja yang diukur, kalau ibu ingin mencalonkan diri dan mau membantu NU InsyaAllah kita do'akan, kita hanya menawarkan do'a saja kepada Ibu (Hj. Indah Putri Indriani) sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah Swt Bu yang penting Ibu mau dulu dan kita akan bantu”⁶⁷

Dukungan yang dilakukan oleh Muslimat NU dalam bentuk do'a merupakan upaya untuk mendapat pemimpin yang arif, bijak dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu. Ibu Hj. Indah Putri Indriani dirasa pantas untuk menjadi Bupati sebab beliau merupakan sosok yang dapat mengakomodir semua kepentingan, merakyat, dapat merangkul semua dan tidak diskriminatif terhadap orang/ kelompok apalagi diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu. Berbeda dengan Bupati yang sebelumnya menjabat yaitu Bapak Drs. H. Arifin Junaidi yang oleh orang-orang Muslimat NU Kab. Luwu Utara merasa kecewa terhadap kepemimpinannya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurlela selaku Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara sebagai berikut:

“Karena Pak Bupati yang dulu (Bapak Arifin Junaidi) tidak begitu perhatian/dekat sama kita (Muslimat NU) bahkan kami tidak pernah ketemu secara langsung. Kita undang dia

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Parmi (Ketua Muslimat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 26 September 2017

dipengajian NU datangnya terlambat sampai kacau kegiatan tersebut, karna acaranya tidak boleh dimulai kalau Pak Bupatinya belum datang. Beda sama Ibu (Hj. Indah Putri Indriani) dia itu merakyat, merangkul semua, tidak pilih-pilih. Walaupun sama orang kecil dia itu sapu ratalah mengayomi semua beda sama Bupati yang dulu jaga jarak dia”⁶⁸

Itulah sebabnya mengapa anggota dan pengurus Muslimat NU mendoakan Ibu Hj. Indah Putri Indriani untuk dapat menjadi Bupati Kab. Luwu Utara Periode tahun 2016-2021. Melalui do’a seluruh anggota dan pengurus Muslimat NU Kab. Luwu Utara mendukung secara penuh Ibu Hj. Putri Indriani. Do’a yang ditawarkan pun merupakan do’a yang tidak hanya berasal dari Muslimat saja melainkan ada juga dari kalangan Ulama, Tokoh NU dan Pemimpin-pemimpin pondok pesantren yang bukan hanya berasal dari Kab. Luwu Utara saja namun ada juga para Usztad-usztad yang berasal dari luar Kab. Luwu Utara seperti Usztad Sirkinwanto dari Makassar dan Usztad Hafid dari Takar juga turut mendo’akan beliau (Ibu Hj. Indah Putri Indriani). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar peduli terhadap masalah yang ada di Kabupaten ini, bukan hanya sekedar pencitra politik yang dibangun.

2. Kontrak Politik Muslimat NU-Ibu Hj. Indah Putri Indriani

Dukungan Muslimat NU Kab. Luwu Utara terhadap Ibu Hj. Putri Indriani selain melakukan aktifitas kampanye, mendeklarasikan diri melalui do’a yang diperuntukkan kepada beliau, juga terdapat kontrak yang dilakukan antara Muslimat NU dan Ibu Hj. Indah Putri Indriani. Sebagai organisasi keagamaan yang visinya

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Nurlela (Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 27 September 2016)

adalah terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam *Ahlusunnah wal Jama'ah* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridhai Allah Swt. Sudah sepatutnya hal tersebut harus dilaksanakan bukan hanya dilingkungan NU saja tetapi harus juga dirasakan oleh orang lain dan bukan hanya kaum perempuan saja tetapi harus dirasakan juga oleh kaum laki-laki agar visi tersebut dapat tercapai sesuai dengan keinginan dan kesepakatan Muslimat NU secara nasional.

Visi yang ditawarkan oleh Ibu Hj. Indah Putri Indriani dan Bapak Muh. Thahar Rum adalah Luwu Utara yang religius dengan pembangunan berkualitas dan merata yang berlandaskan kearifan lokal.⁶⁹ Tujuan visi tersebut yaitu untuk menanamkan kesadaran beragama dalam kehidupan sosial yang ada di Kab. Luwu Utara.

Dalam program religius yang dirintis oleh Ibu Hj. Putri Indriani ini diantaranya adalah shalat subuh secara berjamaah, program T10 atau tauziah keagamaan 10 menit dan program pengajian bulanan yang tidak hanya diperuntukkan bagi pegawai Pemda saja namun program pengajian bulanan ini juga diperuntukkan kepada masyarakat secara langsung. Selain itu, ada permintaan dari Muslimat NU Kab. Luwu Utara kepada Ibu Hj. Indah Putri Indriani ketika saat itu menjadi calon Bupati yaitu membantu program Muslimat NU Kab. Luwu Utara untuk mensukseskannya. Hal tersebut didasarkan pada permasalahan umat khususnya dari

⁶⁹ <https://luwuutarakab.go.id/page/3/visi-dan-misi.html> (Diakses Pada 19 November 2017 Pukul 19.59 WITA)

kalangan NU ditingkat Daerah yang perlu perhatian besar Pemerintah Daerah sebab otoritas organisasi tidak dapat menyelesaikannya karena keterbatasan pendanaan. Adapun yang menjadi kontrak politik Muslimat NU dan Ibu Hj. Indah Putri Indriani adalah pengajian bulanan yang intens dilakukan, santunan anak yatim dan lansia, kesejahteraan guru TPA/TPQ dan menghadiri hari besar NU. Muslimat NU menawarkan beberapa pernyataan yang disampaikan kepada Ibu Hj. Indah Putri Indriani untuk dijadikan sebagai kontrak politik antar keduanya. Secara umum program yang ditawarkan oleh Ibu Hj. Indah Putri Indriani memang sejalan dengan kebutuhan Muslimat NU Kab. Luwu Utara namun ada hal yang lain juga perlu untuk diperhatikan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Parmi sebagai berikut:

“Kita cari program-program kandidat yang sama dengan program kita (Muslimat) dan mengeti permasalahan. Program-program yang Ibu tawarkan sejalan dengan Muslimat. Tidak ada kepentingan pribadi atau kepentingan organisator tapi secara ummat karena Muslimat tidak terlepas dari ummat”⁷⁰

Program religius tersebut merupakan program yang bukan untuk kepentingan Muslimat NU semata melainkan untuk kesejahteraan ummat khususnya orang-orang NU yang membutuhkan banyak perhatian Pemerintah Daerah.

a. Pengajian Bulanan Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Pengajian bulan yang dicanangkan oleh Ibu Hj. Indah Putri Indriani merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk membangkitkan semangat masyarakat untuk intens melakukan kegiatan keagamaan yang harus dilakukan

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Parmi (Ketua Muslimat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 26 September 2017

dan diaktifkan disetiap Dusun sampai ke tingkat Kabupaten. Muslimat NU yang memiliki program yang serupa sangat memberikan apresiasi dan dukungan terhadap program-program religius tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Alwi sebagai berikut:

“Program Ibu Indah merupakan program religius. Dikita (Muslimat) program dari Ibu itu untuk membangkitkan majelis ta’lim disetiap Dusun sampai Kabupaten makanya Muslimat juga ikut dalam agenda tersebut dan kita dukung”⁷¹

Program religius merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran beragama yang tujuannya adalah pembentukan akidah yang baik di dalam masyarakat. Seperti halnya dengan Ibu Alwi, Ibu Indarwati pun selaku anggota dari Muslimat sangat memberikan apresiasi yang tinggi sebab organisasinya semakin intens melakukan kegiatan pengajian yang dilakukan tiap bulannya sebab ada perhatian dari Pemerintah Daerah dan program Muslimat NU sendiri juga terbantu dengan hal tersebut.

“Secara pribadi saya sangat mengapresiasi program Pemerintah, dengan begitu organisasi kita juga terbantu karena program yang sama tersebut. Selain itu karena persamaan program kita (Muslimat) jadi sering bermitra dengan Pemerintah Daerah”⁷²

Program pengajian bulanan dapat dijadikan sebagai upaya Ibu Hj. Indah Putri Indriani untuk senantiasa bermitra dengan masyarakat sehingga dapat menjaga komunikasi dengan baik dengan masyarakat. Melalui itu semua Ibu Hj. Indah

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Alwi (Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 26 September 2017

⁷² Wawancara dengan Ibu Indarwati (Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 27 September 2017

Putri Indriani memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat sehingga dapat menjadi modal prestise yang dapat mengangkat eksistensinya dan dapat memperluas jangkauannya dalam karir politik lokal.

b. Kepeduliam Terhadap Anak Yatim dan Lansia

Memberikan santun kepada anak yatim dan kepedulian terhadap lansia didasarkan pada kesadaran Muslimat NU Kab. Luwu Utara. Ibu Hj. Indah Putri Indriani mampu untuk mengakomodir kepentingan Muslimat NU. Dengan melakukan sinergitas dan menjadikan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara sebagai mitra untuk merealisasikan program Muslimat NU, anak-anak yatim dan kaum lansia dapat terbantu dalam urusan ekonominya. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Bupati dapat dijadikan sebagai alat untuk memengaruhi pemikiran maupun tingkah laku seseorang, dengan cara menggunakan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan.

Pada prinsipnya, kekuasaan merujuk pada potensi, dedikasi tinggi, serta profesionalisme baik dalam hal teoritis, praktis dan manajemen. Hal ini lah yang dicoba dilakukan oleh Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani dalam melaksanakan tugasnya dan untuk membangkitkan kaum perempuan yang selama ini dimarginalkan. Memberikan program yang produktif dan membantu sesama perempuan adalah suatu upaya untuk terbebas dari ketidakadilan sosial dimasyarakat. Ini pun menjadi keinginan Muslimat NU yang juga menginginkan pemimpin yang bersal dari kaum perempuan. Seperti yang Ibu Parmi katakan:

“Kita juga ini menginginkan perempuan bisa menjadi pemimpin. Yang mengerti persoalan kita (perempuan) dan mengerti juga permasalahan yang dirasakan oleh anak-anak, orang yang sudah lanjut usia dan tentu kesejahteraan para guru mengaji”⁷³

Ini pun menjadi semangat yang baru untuk kaum perempuan Kab. Luwu Utara sebab kondisi yang selama ini terjadi sangat tidak memungkinkan kaum perempuan untuk leluasa beraktivitas di wialah publik. Kondisi tersebut terbangun oleh sebab faktor sosial, kultur, politik, regulasi, ekonomi dan kesalahpahaman terhadap doktrin agama. Dalam konteks Indonesia, kultur patriarki yang melekat erat dalam pikiran rakyat Indonesia membuat langkah perempuan untuk turut serta membantu sesama khususnya anak yatim dan kaum lansia dalam ranah publik mengalami banyak tantangan dan cibiran dari banyak kalangan. Namun dengan upaya yang dilakukan secara kolektif maka kaum perempuan dapat menjadi kaum yang juga memiliki kedudukan di dalam masyarakat seperti yang Ibu Hj. Indah Putri Indriani lakukan dan Muslimat NU Kab. Luwu Utara selaku organisasi perempuan yang basisnya adalah keagamaan mampu untuk berbuat dengan menyatukan persepsi dan program untuk anak-anak dan khususnya kaum perempuan itu sendiri.

c. Kesejahteraan Guru TPA/TPQ

Keikhlasan guru TPA/TPQ merupakan modal utama dalam membina dan mengajarkan Al-Qur'an terhadap santri-santrinya. Dengan modal iklas yang

⁷³ Wawancara dengan Ibu Parmi (Ketua Muslimat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 26 September 2017

mendalam tersebut para santri cepat bisa membaca Al-Qur'an. Namun dengan demikian bukan berarti guru mengaji tidak memerlukan kebutuhan hidup untuk menunjang kehidupannya lebih lanjut layaknya orang lain.

Dewasa ini kesejahteraan guru TPA/TPQ merupakan permasalahan yang dianggap perlu juga diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Muslimat NU menganggap bahwa kesejahteraan haruslah merata dan butuh perhatian Pemerintah. Muslimat NU menjadi pioneer untuk melanjutkan aspirasi guru TPA/TPQ tersebut kepada Ibu Hj. Indah Putri Indriani dan hal tersebut direspon dengan baik. Khusus insentif yang diterima oleh guru TPA/TPQ ketika Ibu Hj. Indah Putri Indriani menjabat dirasa sudah cukup, berbeda sebelum beliau menjabat sebagai Bupati. Hal ini tentu dapat menjadikan Ibu Hj. Indah Putri Indriani sebagai idola bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian Pemerintah Daerah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurlela.

“Pemerintahan Ibu Indah sangat perhatian dengan kami ini para guru mengaji, berbeda dengan Pemerintahan sebelumnya”⁷⁴

Ungkapan Ibu Nurlela dapat menandakan suatu apresiasi bahwa keterlibatan kaum perempuan atau wacana kepemimpinan perempuan di wilayah publik adalah hal yang harus terus diperbincangkan sebab fakta politik menunjukkan tidak seharusnya kaum perempuan harus dimarginalkan. Kaum Perempuan di era demokrasi nampaknya menemukan peluang untuk berkompetisi, berebut

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Nurlela (Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 27 September 2016)

kekuasaan dan bahkan dapat menjadi pemangku kepentingan di ranah publik layaknya Ibu Hj. Indah Putri Indriani.

Selain itu, ada Permasalahan Muslimat secara nasional yang harus dicari solusi agar tidak terjadi lagi ketimpangan. Solusi tersebut juga dilakukan dalam bentuk program. Problem-problem keutamaan, khususnya perempuan, harus dipecahkan secara bersama. Diantaranya, terdapat pembahasan masalah nikah *sirri*. Masalah ini penting karena nikah *sirri* biasanya diikuti kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagian besar korbannya adalah perempuan. Memang para ulama mengatakan hal itu diperbolehkan, tetapi nikah *sirri* kerap menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Selain nikah *sirri*, ada permasalahan yang lain yaitu kawin kontrak dan aborsi.⁷⁵

Persoalan diatas, merupakan persoalan yang banyak dialami oleh orang-orang yang tidak memiliki daya yang cukup untuk menyuarakan hal tersebut. Muslimat NU sebagai organisasi pemberdayaan perempuan dan juga memperhatikan anak-anak yang masih berusia kecil sudah sepatutnya ikut membantu sesama ditambah lagi persoalan nasional yang sering kali perempuan adalah korban. Persoalan tersebut memang lebih banyak diketahui oleh kaum perempuan sebab kaum tersebutlah yang memahami secara mendalam keadaan yang dialami, dirasakan dan ditimpa oleh perempuan. Untuk itu memang dibutuhkan sinergitas antar

⁷⁵ Khofifah Indar Parawansa, *NU Perempuan Indonesia: Sudut Pandang Islam Tradisional*, (Bandung: Nuansa Cendekira, 2015), h. 249

perempuan itu sendiri dan tentu didukung oleh pemerintah selaku penentu kebijakan.

Secara organisasi memberikan dukungan politik kecalon tertentu memang tidak diperbolehkan dari Pimpinan Pusat Muslimat NU sebab hal tersebut akan melanggar aturan yang telah ditetapkan apalagi terlibat dalam politik praktis. Namun sebagai individu yang tidak boleh buta akan politik Muslimat NU tidak tinggal diam. Seperti yang Ibu Parmi sampaikan:

“Secara organisasi kita sudah mendapatkan doktrin dari pusat kalau Muslimat tidak boleh berafiliasi kecalon tertentu tapi saya sampaikan bahwa tidak, secara organisasi memang demikian tetapi kita juga tidak boleh buta terhadap politik. Tetapi secara personal orang-orang Muslimat juga yang kita beri pemahaman politik dan tau persoalan perempuan”⁷⁶

Dengan demikian, organisasi perempuan NU ini pun merasa harus bangkit atas apa yang selama ini terjadi dan dirasakan. Mencari kesamaan program untuk perempuan, anak yatim hingga lansia merupakan upaya Muslimat NU untuk mengaktualisasikan organisasi yang tujuannya adalah memberdayakan ummat khususnya NU.

Untuk lebih aktif dan produktif terhadap organisasi, Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Muslimat dan seluruh organisasi yang ada di Kabupaten Luwu utara. Hal yang sama pun disampaikan oleh Ibu Parmi selaku ketua Muslimat NU Kab. Luwu Utara:

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Parmi (Ketua Muslimat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 26 September 2017

“Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah yang diperuntukkan kepada organisasi untuk pengembangan kita (Muslimat NU) kedepannya”⁷⁷

Pemberian dana tersebut tentu dapat menjadi upaya Ibu Hj. Indah Putri Indriani untuk melakukan aktivitas yang produktif terhadap organisasi yang ada di Kab. Luwu Utara agar dapat mampu untuk bersaing dengan kaum laki-laki.

d. Menghadiri Hari Besar NU

Kontrak politik yang terakhir diajukan oleh Muslimat NU Kab. Luwu Utara adalah menghadiri hari besar NU. Kontrak politik ini diajukan bukan tanpa sebab. Pemerintahan yang dulu menurut Ibu Parmi tidak memberikan perhatian yang besar kepada NU secara umum dan Muslimat NU secara khusus. Seperti yang disampaikan Ibu Parmi:

“Kalau dulu Bupatiya tidak begitu memberikan perhatian bagi kita”⁷⁸

Dengan demikian, sebagai salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Muslimat NU kepada Ibu Hj. Indah Putri Indriani adalah menghadiri setiap hari kebesaran NU dan Muslimat NU. Hal ini tentu merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada Ibu Hj. Indah Putri Indriani karena masyarakat memberikan kepercayaan dan dapat menjadi legitimasi politik kepadanya sehingga Muslimat NU dapat merakasan dampak yang baik.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Parmi (Ketua Muslimat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 26 September 2017

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Parmi (Ketua Muslimat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 26 September 2017

2. Bentuk Dukungan Fatayat NU Kabupaten Luwu Utara Pada Ibu Hj. Indah Putri Indriani di Pilkada Serentak Tahun 2015

Secara organisasi Muslimat dan Fatayat merupakan organisasi yang berada dalam naungan yang sama yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Kedua organisasi keperempuanan NU ini memiliki aturan tersendiri didalamnya. Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama merupakan organisasi perempuan muda, yang dimana lingkungan aktifitasnya adalah tentang keagamaan dalam Islam. Dalam organisasi ini perempuan berperan untuk memperjuangkan agama dan membangun kualitas generasi pemudi yang berpedoman pada Al-Qur'an.⁷⁹

Tugas untuk memperjuangkan agama dan pembangunan generasi pemudi Fatayat merupakan suatu jalan untuk memberikan kesempatan kepada pemudi Fatayat untuk berkesempatan dalam menjalankan perintah Allah Swt. Hal tersebut sesuai dengan tugas manusia yaitu menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah terjadinya *kemungkaran* di muka bumi ini. Hal inilah yang juga memotivasi pemudi Fatayat NU Kab. Luwu Utara untuk turut serta dalam agenda melaksanakan perintah Allah Swt, berperan aktif dalam masyarakat, dan juga mendukung Pemerintah Kab. Luwu Utara dalam mencapai programnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Fatayat NU Kab. Luwu Utara pada pilkada tahun 2015 yang lalu adalah melakukan mobilisasi kader Fatayat NU. Hal ini

⁷⁹ Elis Erviana, *Sejarah Perkembangan Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama Di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2013*, (Jurnal Program Studi Sejarah: STKIP PGRI Sidoarjo Genta, Vol. II Nomor 2, September 2014), h. 290.

merupakan suatu bentuk dukungan terhadap Ibu Hj. Indah Putri Indriani yang diberikan oleh Fatayat NU Kab. Luwu Utara.

1. Mobilisasi Kader Fatayat NU

Pengklasifikasian jenis kelamin dewasa ini sehingga ada yang merasa *superior* dan ada yang merasa *inferior* jika dipahami secara mendalam tidaklah harus terjadi lagi sebab peran sosial saat ini dapat dipegang oleh siapa saja. Seperti yang dikemukakan oleh Peter Burke, peran sosial didefinisikan dalam pengertian pola-pola atau norma-norma perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam struktur sosial.⁸⁰ Setiap perubahan sosial didasari oleh keinginan seseorang atau kelompok untuk melakukan perubahan didalam masyarakat. Perubahan inilah yang akan menjadi sesuatu hal yang baru untuk kemajuan suatu kaum atas apa yang selama ini terjadi dan dirasakan.

Untuk itu, Fatayat NU Kab. Luwu Utara berkeinginan kaum perempuan untuk berkiprah secara leluasa di ruang publik apalagi dengan adanya gender membuat pemahaman kita akan kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sama perannya. Dengan melakukan mobilisasi kader Fatayat NU dapat memberikan dukungan kepada Ibu Hj. Indah Putri Indriani. Inilah yang ditegaskan oleh Ibu Najma.

“Dengan adanya gender tidak ada lagi pengklasifikasian antara laki-laki dan perempuan, keduanya bebas untuk berkiprah didunia apa saja termasuk dunia politik. Saya secara pribadi memberikan himbauan kepada kader untuk memilih calon yang

⁸⁰ Peter Burke, *Sejarah Dan Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011), h. 68.

memiliki kesamaan dengan kita namun kembali lagi ke kader mau memilih siapa karena itu hak mereka”⁸¹

Terjadinya suatu proses transformasi menandakan suatu keadaan yang harus dirubah. Transformasi sekaligus mencakup tiga unsur dalam prosesnya yaitu perbedaan, adanya identitas tertentu, dan bersifat historis yang terikat pada konteks.⁸² Transformasi sosial merupakan perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu. Oleh karena itu, transformasi merupakan suatu proses perubahan atau pembaharuan cara, bentuk, model, strategi maupun pendekatan dalam lingkup waktu tertentu.

Sejalan dengan hal diatas, Fatayat NU Kab. Luwu Utara sadar akan posisi mereka sebagai perempuan dan peran mereka di ruang publik termasuk dunia politik. Sesuai dengan penjelasan Ibu Darmini sebagai berikut:

“Kita setuju kaum perempuan untuk berkiprah dimana saja. Kita sebagai perempuan harus memperjuangkan cita-cita kami sebagai perempuan. Kami tidak mau kalah saing dengan laki-laki. Ibu Indah sebagai perempuan setidaknya dapat mewakili kami ditambah program-program yang ditawarkan”⁸³

Hal yang senada pun disampaikan oleh Ibu Sumri

“Sebagai perempuan kita harusnya bangga karena mengemban beban ganda. Untuk itu kita sebagai perempuan harus maju dan turut serta dalam pemberdayaan perempuan dimana saja”⁸⁴

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Najma (Ketua Fatayat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 27 September 2017

⁸² Zaeny, *Gerakan Keagamaan Di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005), h. 12.

⁸³ Wawancara dengan Ibu Darmini (Anggota Fatayat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 28 September 2017

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Sumri (Anggota Fatayat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 28 September 2017

Keterpilihan Hj. Indah Putri Indriani sebagai Bupati Luwu Utara memang tidaklah terlepas dari peran Muslimat dan Fatayat NU sebagai organisasi keperempuanan yang berasal dari NU. Namun, dibalik semua itu ternyata dukungan tersebut hanyalah nampak dipermukaan saja sebab pada kenyataannya beberapa anggota Muslimat dan Fatayat NU secara pribadi tidak memberikan suaranya pada Hj. Indah Putri Indriani dipilkada serentak Luwu Utara tahun 2015 yang lalu. Bukan berarti dengan adanya calon Bupati dari kaum perempuan saat itu semua perempuan memilih yang berasal dari kaumnya juga. Hal tersebut terbukti bahwa tidak semua kaum perempuan memilih Ibu Hj. Indah Putri Indriani yang disebabkan oleh beberapa faktor satu diantaranya adalah ketakutan yang dirasakan oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) sebab saat itu sudah ada penegasan bahwa harus memilih *incumbent* pada pilkada serentak 2015 yang lalu. Akan tetapi persentasenya sangat minim sebab para anggota Muslimat dan Fatayat sudah membulatkan tekad agar memiliki pemimpin yang berasal dari kaum perempuan, mengerti permasalahan perempuan dan memiliki kesamaan program dengan Muslimat dan Fatayat.

Antar Ibu Hj. Indah Putri Indriani dan organisasi perempuan NU (Muslimat dan Fatayat) memang tidak memiliki kepentingan politik yang menjadikan kedua organisasi ini ber-afiliasi tetapi kesadaran penuh untuk memilih dan mendukung ke Ibu Hj. Putri Indriani. Sebagai upaya tersebut, kedua organisasi dari NU ini semakin membesarkan diri masing-masing dan dapat berkontribusi kepada Daerah dalam skala kecil dan negara pada skala yang besar khususnya untuk pengembangan kaum perempuan dan anak-anak.

2. Mendukung Program Ibu Hj. Indah Putri Indriani

Sebagai organisasi keagamaan perempuan, Fatayat NU mencoba untuk turut serta melakukan upaya agar pengembangan Agama di dalam masyarakat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu cara yang dilakukan oleh Fatayat NU Kab. Luwu Utara adalah mendukung program religius dan pengembangan kaum perempuan yang ditawarkan oleh Ibu Hj. Indah Putri Indriani dan Thahar Rum pada pilkada serentak tahun 2015 yang lalu. Hal ini merupakan bentuk dukungan agar ajaran Agama di dalam masyarakat dapat berjalan sesuai perintah Allah Swt.

a. Program Kerja Religius

Program religius merupakan program yang oleh Fatayat NU Kab. Luwu Utara harus menjadi program prioritas sebab selain karena latar belakang keagamaan organisasi ini, ada alasan yang lain juga yaitu perhatian yang diberikan oleh Ibu Hj. Indah Putri Indriani kepada masyarakat Kab. Luwu Utara untuk menanamkan nilai-nilai agama didalamnya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Fatayat NU Kab. Luwu Utara sebagai berikut:

“Sejalan dengan cita-cita Fatayat, Ibu Indah memiliki kesamaan dengan kita (Fatayat), dimana Visi Ibu yaitu mewujudkan Luwu Utara yang religius karna itu kita juga mau melihat nilai-nilai keagamaan itu lahir di Luwu Utara jadi otomatis sangat sejalan dengan dengan kita agar syiar-syiar agama itu nampak”⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Najma (Ketua Fatayat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 27 September 2017

Untuk mendukung itu semua Fatayat NU juga berpartisipasi didalamnya guna tercapainya cita-cita Fatayat NU. Dengan adanya kegiatan religius yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara hal tersebut dapat meningkatkan perananan kaum Perempuan Kab. Luwu Utara dalam berbagai bidang kehidupan seperti beragama, bernegara, dan bermasyarakat. Menjunjung budi yang tinggi di dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya kegiatan religius tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan derajat generasi pemuda khususnya Fatayat Kab. Luwu Utra yang Islami dan dapat membina persahabatan dengan organisasi-organisasi lainnya terutama organisasi kepemudaan dan keperempuanan.

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga dapat mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar terhadap keluarganya. Upaya dalam peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan. Hal inilah yang dilakukan oleh Ibu Hj. Indah Putri Indriani dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu upayanya adanya pelatihan bagi kaum perempuan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Mania selaku sekretaris Fatayat NU Kab. Luwu Utara sebagai berikut:

“Ada program Ibu Indah untuk meningkatkan keterampilan ibu-ibu, kita dari Fatayat mengadakan pelatihan yang diperuntukkan kepada ibu-ibu untuk meningkatkan kreatifitas mereka dan bekerja sama dengan Pemerintah dan kami sangat mendukung semua itu”⁸⁶

Lanjut Ibu Mania,

“Dengan adanya program yang tujuannya untuk kaum perempuan kita sangat mendukung. Sebagai contoh lainnya yang digagas oleh Ibu Indah yaitu program pencegahan penggunaan narkoba, kita dari Fatayat juga berperan dengan mengadakan sosialisasi pencegahan narkoba khusus bagi kaum perempuan dan ini kami telah laksanakan di Hotel Remaja”⁸⁷

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Mania bahwa dengan adanya pelatihan tersebut Pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari ruang lingkup rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga tersebut mencakup aspek sosial. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan sehingga dapat mandiri secara ekonomi.

Sebagai langkah awal untuk menunjang itu semua Pemerintah Daerah memberikan dana hibah kepada seluruh organisasi yang ada di Kab. Luwu Utara yang tujuannya untuk peningkatan produktivitas organisasi dan masyarakat yang

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Mania (Sekertaris Fatayat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 26 September 2017

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Mania (Sekertaris Fatayat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 26 September 2017

terlibat dalam pelatihan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Najma selaku ketua Fatayat NU Kab. Luwu Utara sebagai berikut:

“Kami diberikan dana hibah untuk pengembangan organisasi. Pemberian dana tersebut agar organisasi bisa hidup dan kita semakin kuat. Jika organisasi berkembang maka sampai ke akar rumput semua menjadi kuat (tingkat Dusun) dan tentu ini membuat kami semakin semangat”⁸⁸

Guna membangun transformasi politik yang buta keadilan gender menuju politik adil gender maka hal-hal yang harus dilakukan adalah pemberdayaan perempuan agar melek politik dan melek demokrasi politik dalam ranah publik. Perempuan harus diberi pengetahuan dan ruang untuk turut serta dalam pengambilan keputusan publik seperti membuat pembangunan indeks kemajuan masyarakat pada level paling rendah sampai tertinggi di Pusat. Perempuan harus pula dididik dan diberdayakan agar memiliki kepekaan dan kemampuan menjadi pemimpin partai politik, atau menjadi anggota partai politik yang aktif sehingga mampu melakukan perubahan dan mewarnai partai politik. Perempuan tidak bisa hanya menjadi anggota pasif serta anggota musiman atau hanya nama dalam struktur tetapi tidak pernah terlibat aktif dalam kepengurusan partai politik seperti terjadi bertahun-tahun di Indonesia. Transformasi politik dari *male perspective* menjadi *female perspective* akan terjadi ketika ada komunikasi yang intensif antar aktivis perempuan, aktivis gerakan perempuan termasuk perempuan dalam ormas, perempuan politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah ataupun Pusat), serta

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Najma (Ketua Fatayat NU Kab. Luwu Utara) tanggal 27 September 2017

pengorganisasi secara massif yang bersifat lintas partai politik serta lintas organisasi perempuan yang memiliki cita-cita memberdayakan perempuan dalam politik sebagai bagian dari pendidikan politik perempuan Indonesia.⁸⁹



⁸⁹ Sri Roviana, *Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama Dalam Transformasi Pendidikan Politik*, (Jurnal Pendidikan Islam: Mitra Wacana Women Crisis Center Yogyakarta, Vol. III Nomor 2, Desember 2014/1436), h. 420-421.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Perempuan NU dan Pilkada (Studi Terhadap Polarisasi Dukungan Politik Muslimat dan Fatayat NU Pada Indah Putri Indriani-Thahar Rum Di Pilkada Serentak Tahun 2015)”. Akan dipaparkan secara singkat mengenai kesimpulan dari penelitian ini. Setelah mengkaji beberapa teori dan menganalisis data yang diperoleh dilapangan.:

1. Antar kedua organisasi NU yaitu Muslimat dan Fatayat NU pada pilkada serentak tahun 2015 yang lalu di Kab. Luwu Utara memang memberikan dukungan yang hanya nampak dipermukaan saja, bahwa dukungan tersebut tidaklah diberikan kepada Ibu Hj. Indah Putri Indriani secara keseluruhan. Ada anggota dari kedua organisasi ini yang tidak memilih Ibu Hj. Indah Putri Indriani. Muslimat NU secara tegas memberikan dukungan dukungan sedangkan Fatayat ragu untuk memberikan dukungan. Memberikan dukungan politik memang adalah hak setiap individu, bagi organisasi yang berada dalam satu naungan yang sama bukan berarti setiap anggotanya memiliki kesamaan pilihan politik kepada calon kepala Daerah.
2. Muslimat dan Fatayat NU mencoba untuk melakukan proses untuk mengembangkan anggotanya dengan tidak buta terhadap politik. Salah satu caranya adalah dengan memberikan dukungan kepada Ibu Hj. Indah Putri

Indriani. Adapaun bentuk dukungan yang diberikan oleh Muslimat NU Kab. Luwu Utara adalah dengan melakukan kampanye politik serta mendo'akan Ibu Hj. Indah Putri Indriani agar menjadi Bupati Kab. Luwu Utara. Selain itu bentuk dukungan lainnya yaitu dengan mengadakan kontrak politik berupa pengajian bulanan, kesejahteraan guru TPA/TPQ, santunan anak yatim dan lansia, serta senantiasa hadir disetiap hari besar NU dan Muslimat NU. Tidak jauh berbeda dengan Muslimat NU, Fatayat NU yang didalamnya adalah para pemudi NU juga melakukan hal yang sama dengan cara memobilisasi kader Fatayat NU dan memberikan dukungan kepada Ibu Hj. Indah Putri Indriani karena adanya kesamaan visi dan program untuk pengembangan kaum perempuan khususnya di Kab. Luwu Utara

B. Implikasi Penelitian

1. Melalui program religius yang dicetuskan oleh Ibu Hj. Indah Putri Indriani diharapkan mampu memberikan kedamaian, kesejukan serta nuansa religi di Kab. Luwu Utara yang tentu tujuannya adalah memberikan kesadaran beragama sehingga tidak ada lagi permasalahan yang terjadi sesama manusia dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di Kab. Luwu Utara
2. Dengan terpilihnya Ibu Hj. Indah Putri Indriani sebagai Bupati hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan dalam Agama dan ruang publik tidaklah menjadi *the second class* (kelas kedua) atau menjadi satu tingkatan dibawah kaum laki-laki. Untuk itu diharapkan peran dan partisipasi kaum

perempuan pada wilayah apapun harus ditingkatkan untuk merangsang kemajuan kaum perempuan itu sendiri sehingga dapat menjadi kaum yang mampu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri serta mengerti kesetaraan gender.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Al-Mahalli, Abu Iqbal, *Muslimah Modern: Dalam Bingkai Al-Qur'an dan Al-Hadits*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000)

Anggriani, Dewi, *Perempuan Dalam Dinamika Beragama: Suatu Tinjauan Antropologi Agama*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013)

Arsip Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama, *Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat NU*, (Sidoarjo: Pimpinan Cabang, 2010)

Budiyono, Kabul, *Teori dan Filsafat Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Bungin, Burhan, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Burke, Peter, *Sejarah Dan Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011)

Chalim, Asep Saifuddin, *Membumikan Aswaja Pegangan Para Guru NU*, (Surabaya: Khalista, 2012)

Diana, Nusrokh, *Kelahiran Muslimat NU, Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, 2015)

Dani, Akhmad dan Siti Hadilang, *Penganggaran Pro Poor dan Responsif Gender Cerita Sukses dari Sinjai dan Luwu Timur*, (Makassar: Komite Pemantau Legislatif, 2014)

Erviana, Elis, *Sejarah Perkembangan Organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama Di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008-2013*, (Jurnal Program Studi Sejarah: STKIP PGRI Sidoarjo Genta, Vol. II Nomor 2, September 2014)

Gaffar, Afan, *Javaners Voters, A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992)

Goncing, Nurlira, *“Perilaku Elit Politik Nahdlatul Ulama Pasca Orde Baru Di Kota Makassar” Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2013)

- Hajar, Ibnu, *Teori dan Praktek Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015)
- Hajaroh, Mami, *Divusi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Fatayat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, Disertasi* (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2012)
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Jurdi, Syarifuddin, *Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*, (Yogyakarta: Lab. Ilmu Politik UINAM, 2015)
- Musa, Kamil, *Anak Perempuan Dalam Konsep Islam*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1994)
- Muslikhati, Siti, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Miaz, Yalvema, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Padang: UNP Press Padang, 2012)
- Parawansa, Khofifah Indar, NU, *Perempuan Indonesia: Sudut Pandang Islam Tradisional*, (Bandung: Nuansa Cendekira, 2015)
- Pimpinan Pusat Muslimat NU, *Pedoman Organisasi dan Administrasi Muslimat NU*, (Jakarta: PP Muslimat NU, 2009)
- Ramdani, Ririn, *Perempuan, Politik Dan Parlemen Di Kota Makassar (studi terhadap keterwakilan perempuan pasca pemilu 2014)*, *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2016)
- Roviana, Sri, *Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama Dalam Transformasi Pendidikan Politik*, (Jurnal Pendidikan Islam: Mitra Wacana Women Crisis Center Yogyakarta, Vol. III Nomor 2, Desember 2014/1436)
- Rusdi, M, *Hadis-Hadis Tarbawih 2*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Saadawi, Nawal, El, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Terj. Zuhilmiyasari Cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Supandi, Irfan, *Dahsyatnya Menjadi Ibu Rumah Tangga*, (Surakarta: Jajar Laweyan, 2011)

Supardan, Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007)

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Cet. XIV, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2006)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009)

Soerjono, dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)

Soetjipto, Ani, Widyani, *Politik Perempuan Bukan Gerhana Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: Kompas, 2005)

Shidqi, Ahmad Ni'am, *"Gerakan Pengarusutamaan Gender Fatayat NU Cabang Jepara Jawa Tengah (2000-2007)"*, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013)

Sjahril, Sri Sumarni, *Politik Perempuan Di Kota Makassar (Studi Terhadap Peran Politik Partai Nasdem Kota Makassar)*, *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 2016)

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)

Watkins, Susan Alice, Marisa Rueda dan Marta Rodriguez, *Feminisme Untuk Pemula*, (Yogyakarta, Resist Book, 2007)

Zaeny, *Gerakan Keagamaan Di Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005)

<https://news.detik.com/berita/3144812/indah-putri-indriani-bupati-perempuan-pertama-di-sulsel> (Diakses Pada 19 November 2017 Pukul 19.25 WITA)

<https://luwuutarakab.go.id/page/3/visi-dan-misi.html> (Diakses Pada 19 November 2017 Pukul 19.59 WITA)

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Bersama Ibu Parmi (Ketua Muslimat NU Kab. Luwu Utara) setelah melakukan wawancara



Bersama Ibu Parmi (Ketua Muslimat NU Kab. Luwu Utara) dan Ibu Mania (Sekertaris Fatayat NU Kab. Luwu Utara) setelah melakukan wawancara



Wawancara dengan Ibu Alwi (Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara)



Wawancara dengan Ibu Darmini (Anggota Fatayat NU Kab. Luwu Utara)



Wawancara dengan Ibu Najma (Ketua Fatayat NU Kab. Luwu Utara)



Bersama Anggota Muslimat NU Kab. Luwu Utara

Biodata Penulis



Ahmad Aufa Zainal dilahirkan di Masamba Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 2 Januari 1996. Anak pertama dari tiga bersaudara hasil buah kasih dari Pasangan Drs. Zainal Abidin dan Dra, Rahayu D, M.Pd.I

Penulis memulai pendidikan dari Sekolah Dasar Temmalebba kemudian pindah di Sekolah Dasar 484 Salupikung (Sekarang SD Salupikung) dan lulus pada tahun 2008. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis kemudian melanjutkan di SMP Negeri 8 Palopo dan menyelesaikan studinya pada tahun 2011. Setelah lulus dari sekolah menengah pertama, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Palopo dan berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2014. Setelah lulus di sekolah menengah atas penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2014 dan lulus di Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik.

Penulis pernah menjadi Ketua Osis di SMP Negeri 8 Palopo dan menjadi pengurus inti Osis di SMA Negeri 2 Palopo serta aktif diberbagai organisasi sekolah. Semasa kuliah penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Selain itu penulis juga aktif menulis di media cetak dan blog pribadi. Penulis juga ketika masih SMA banyak menjuarai berbagai perlombaan Modeling tingkat Provinsi hingga tingkat Nasional dan pernah mendapatkan gelar King Of Model di Jakarta pada tahun 2012. Penulis menyadari bahwa dengan berorganisasi dan melakukan kegiatan/aktifitas yang produktif dapat meningkatkan kualitas dan potensi yang ada pada diri penulis. Namun demikian bukan berarti penulis melalaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa untuk kuliah. Jadi harus ada keseimbangan antara organisasi dan kuliah sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas penulis ketika sudah terjun ke dalam masyarakat.